

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 UMUM**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan satu dari beragam indikator ekonomi yang digunakan dalam mengukur kinerja perekonomian. Indikator tersebut memberikan gambaran mengenai nilai barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh suatu ekonomi. Pemanfaatan indikator PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, dengan indikator ekonomi dan sosial lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kesejahteraan manusia dalam suatu wilayah.

Penerapan Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah berimplikasi pada munculnya hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan implementasi kedua undang-undang tersebut, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang ada di daerahnya secara lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota diantaranya adalah pelayanan dasar yang mencakup kegiatan statistik dan perencanaan pembangunan. Selain itu, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mendasari kegiatan penyusunan perencanaan di tingkat daerah, dimana sesuai dengan definisi perencanaan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan yang baik didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perencanaan yang sistematis dan komprehensif hanya dapat diwujudkan apabila setiap tahapan perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat. Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, akan memerlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Kebijakan dan strategi yang telah dilakukan perlu dimonitor dan dilihat hasilnya, sehingga data statistik yang memberikan ukuran kuantitas ekonomi

secara makro, mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran keadaan masa lalu dan masa kini serta sasaran yang hendak dicapai pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan ketersediaan data ekonomi yang cukup representatif sebagai suatu indikator, seperti PDRB.

Terdapat perhatian besar berkaitan dengan pengembangan sistem data untuk memantau perkembangan kemajuan di seluruh sektor, khususnya disektor ekonomi, baik untuk daerah propinsi maupun untuk daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tuntutan akan ketersediaan data PDRB sebagai salahsatu indikator ekonomi daerah semakin meningkat, terutama di era otonomi daerah.

Pemerintah daerah Kota Samarinda menyadari bahwa keberadaan data PDRB sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan di daerah sangat penting. Oleh karena itu, Bappeda Kota Samarinda bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda melakukan penghitungan PDRB Menurut Lapangan Usaha. Diharapkan data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang representatif bagi perkembangan ekonomi Kota Samarinda, baik secara umum maupun secara masing-masing sektor ekonomi.

## **1.2 KONSEP DAN DEFINISI UMUM YANG DIGUNAKAN**

### **1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar**

Angka Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (biaya produksi). Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah & gaji, bunga, sewa tanah & keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar.

### **1.2.2 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar**

Perbedaan antara konsep netto dan konsep bruto ialah karena pada konsep bruto di atas, penyusutan masih termasuk didalamnya, sedangkan pada konsep netto komponen penyusutan telah dikeluarkan. Dengan demikian, produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan memperoleh produk domestik regional netto atas dasar harga pasar. Penyusutan

(depresiasi) yang dimaksud disini adalah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan “penyusutan” yang dimaksud di atas.

### **1.2.3 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor**

Perbedaan antara konsep biaya faktor dengan konsep harga pasar di atas adalah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut Pemerintah dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tak langsung dari unit-unit produksi biasanya dapat mengakibatkan kenaikan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya saja yang satu berpengaruh menaikkan harga sedang yang lain menurunkan harga, sehingga apabila pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung netto. Selanjutnya produk domestik regional netto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung netto akan merupakan produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor.

#### 1.2.4 Pendapatan Regional

Dari konsep-konsep yang diterangkan di atas dapat diketahui bahwa produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah tersebut. Produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah & gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul, atau merupakan pendapatan yang berasal dari wilayah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi ternyata tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk regional, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk region (wilayah) lain, seperti suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di wilayah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar, yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi. Sebaliknya kalau ada penduduk wilayah ini menanamkan modal diluar wilayah maka sebagian keuntungan perusahaan tadi akan mengalir kedalam wilayah tersebut, dan menjadi pendapatan pemilik modal tadi. Apabila produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir tadi, maka hasilnya akan merupakan produk regional netto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima (*income received*) oleh seluruh

penduduk yang tinggal di region dimaksud. Produk regional netto inilah yang seharusnya merupakan Pendapatan Regional (*Regional Income*). Akan tetapi untuk mendapatkan angka-angka tentang pendapatan yang mengalir keluar/ masuk wilayah (*income transfer*) masih sangat sukar diperoleh maka produk wilayah tersebut terpaksa belum dapat dihitung dan untuk sementara dalam penghitungan ini Produk Domestik Regional Netto “dianggap” sebagai pendapatan regional. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, maka akan diperoleh rata-rata pendapatan perkapita.

#### **1.2.5 Pendapatan Orang Seorang (*Personal Income*) dan Pendapatan Siap Dibelanjakan (*Disposable Income*)**

Dari yang diutarakan sebelumnya, maka konsep-konsep yang dipakai dalam pendapatan regional, sehingga dapat diperoleh angka pendapatan orang seorang (*personal income*) dan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) diuraikan sebagai berikut :

- (1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar (*GRDB at market prices*), dikurangi penyusutan akan sama dengan;

- (2). Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar harga pasar (*NRDP at market prices*), kemudian apabila dikurangi dengan pajak tidak langsung netto akan sama dengan ;
- (3). Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar biaya faktor (*NRDP at factor cost*), kemudian apabila ditambah pendapatan netto yang mengalir dari/ke daerah akan sama dengan ;
- (4). Pendapatan Regional (*Regional Income*) dan kemudian apabila dikurangi pajak pendapatan perusahaan (*corporate income taxes*), keuntungan yang tidak dibagikan (*undistributed profit*), iuran kesejahteraan sosial (*social security contribution*), ditambah transfer yang diterima oleh rumah tangga, bunga netto atas bunga pemerintah, akan sama dengan ;
- (5). Pendapatan orang perorang (*personal income*) yang apabila dikurangi pajak rumah tangga, transfer yang dibayarkan oleh rumah tangga akan sama dengan ;
- (6). Pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*).

Dengan susunan ini terlihat bahwa pendapatan orang seorang merupakan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Ternyata tidak seluruh pendapatan regional diterima oleh rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian tidak dibayar kepada rumah tangga akan tetapi pajak pendapatan perusahaan diterima oleh pemerintah, keuntungan yang tidak dibagikan ditahan oleh perusahaan-perusahaan, dan dana jaminan sosial dibayarkan kepada instansi-

instansi yang berwenang. Tetapi sebaliknya, rumah tangga masih menerima tambahan yang merupakan transfer baik dari pemerintah maupun perusahaan dan bunga netto atas hutang pemerintah. Bila pendapatan orang seorang ini dikurangi dengan pajak yang langsung dibebankan kepada rumah tangga, maka hasilnya merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*).

### **1.2.6 Produk Domestik dan Produk Regional**

Seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari/atau dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut, merupakan produk domestik regional yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Yang dimaksud dengan wilayah domestik atau regional adalah meliputi wilayah yang berada didalam batas geografis wilayah tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi disuatu wilayah berasal dari wilayah lain, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki wilyah tersebut ikut pula dalam proses produksi di wilayah lain. Hal ini akan mempengaruhi nilai produksi domestik yang diterima penduduk wilayah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar wilayah ini (termasuk juga dari/ke luar negeri) yang

pada umumnya berupa upah & gaji, deviden dan keuntungan, maka timbul perbedaan antara produk domestik dan regional.

### **1.2.7 Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan**

Seperti telah diuraikan sebelumnya, angka-angka pendapatan regional antara lain dapat dipakai untuk mengukur kenaikan tingkat pendapatan, dimana kenaikan itu dapat disebabkan oleh dua faktor :

- (1). Kenaikan pendapatan yang betul-betul dapat menaikkan daya beli penduduk/kenaikan riil.
- (2). Kenaikan pendapatan yang disebabkan karena adanya inflasi (merosotnya nilai uang). Jenis kenaikan pendapatan ini tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan semu (tidak riil).

Oleh karena itu untuk mengetahui pendapatan yang sebenarnya, faktor inflasi ini terlebih dahulu harus dikeluarkan, yang kemudian disebut pendapatan regional atas dasar harga konstan. Pendapatan regional dengan faktor inflasi yang masih ada didalamnya merupakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Dengan alasan inilah, maka pendapatan regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sejak tahun 2004, harga konstan yang digunakan adalah harga tahun 2000.

### **1.3 METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN REGIONAL**

Pendapatan regional dapat dihitung melalui dua metode pendekatan yaitu :

- (1). Metode langsung (*Direct Method*)
- (2). Metode tidak langsung (*Indirect Method*)

Yang dimaksud dengan metode langsung adalah metode penghitungan PDRB dengan mempergunakan data di daerah secara terpisah dengan data nasional sehingga hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut.

Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu :

- (1). Pendekatan produksi (*production approach*)
- (2). Pendekatan pendapatan (*income approach*)
- (3). Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*)

Sedangkan metode tidak langsung antara lain dengan cara alokasi, yaitu mengalokasikan pendapatan propinsi dan nasional menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokatornya.

### **1.3.1 Metode Langsung**

#### **1.3.1.1 Pendekatan Produksi**

Pendekatan produksi ini bermaksud menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara/produksi dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang, seperti pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

#### **1.3.1.2 Pendekatan Pendapatan**

Dalam pendekatan pendapatan maka nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Dalam hal sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang dimaksud surplus disini adalah bunga netto, sewa tanah dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan ini

banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa seperti sektor pemerintah. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak tersedianya dan kurang lengkapnya data mengenai nilai produksi dan biaya antara (*production account*).

### **1.3.1.3 Pendekatan Pengeluaran**

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi didalam negeri. Jadi kalau dilihat dari segi penggunaan, maka total *supply* dari barang dan jasa itu digunakan untuk :

- (1). Konsumsi rumah tangga
- (2). Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung
- (3). Konsumsi pemerintah
- (4). Pembentukan modal tetap bruto
- (5). Perubahan stok (inventori)
- (6). Ekspor netto

Dipakainya istilah ekspor netto disini adalah karena yang dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi dalam negeri/daerah saja, maka dari jumlah penyediaan diatas perlu dikeluarkan kembali nilai impornya.

### **1.3.2 Metode Tidak Langsung**

Metode tidak langsung adalah semacam cara mengalokasikan Produk Domestik Bruto Indonesia ke tiap Propinsi atau Kabupaten/Kota dengan menggunakan alokator tertentu, alokator yang dapat didasarkan atas :

- (1). Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/sub sektor
- (2). Jumlah produksi fisik
- (3). Tenaga Kerja
- (4). Penduduk
- (5). Jumlah pengguna/pengunjung, dan
- (6). Alokator tidak langsung.

### **1.4 CARA PENYAJIAN DAN ANGKA INDEKS**

Agregat-agregat pendapatan seperti yang telah diuraikan di atas, secara series juga selalu disajikan dalam angka indeks pada dua bentuk yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar.

Pendapatan agregat juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks implisit, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1). **Indeks Perkembangan**, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya.
- (2). **Indeks Berantai**, diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Jadi disini tahun sebelumnya selalu dianggap 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.
- (3). **Indeks Implisit**, diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga yang berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Yang disebut juga perkembangan indeks harga produsen (IHP) sektoral/sub sektor. Selanjutnya bila dari indeks implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga/harga produsen setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.

## **1.5 PENGHITUNGAN SERI PENDAPATAN NASIONAL/ REGIONAL ATAS DASAR HARGA KONSTAN**

Seperti telah diuraikan sebelumnya, penghitungan seri pendapatan nasional/regional atas dasar harga konstan 2000 sangat penting untuk melihat perkembangan riil dari tahun ke tahun dari setiap agregat ekonomi yang diamati. Agregat yang dimaksud dapat merupakan produk domestik bruto secara keseluruhan, dari nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1.5.1 Revaluasi**

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 1993, dan hasilnya merupakan output dan biaya antara hasil penghitungan diatas. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

### **1.5.2 Ekstrapolasi**

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

### **1.5.3 Deflasi**

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga perdagangan besar dan sebagainya. Indeks harga di atas dapat pula dipakai sebagai inflator, dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

#### **1.5.4 Deflasi Berganda**

Dalam deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya. Sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Kenyataan sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara disamping karena komponen dan komoditinya juga terlalu banyak disamping indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai. Walaupun penghitungan komponen penggunaan produk domestik bruto atas dasar harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara diatas, menyesuaikan dengan data yang tersedia di masing-masing daerah, maka cara deflasi dan ekstrapolasi lebih banyak dipakai.

## **BAB II**

### **URAIAN SEKTORAL**

Uraian sektoral yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor, sub-sektor dan komoditinya, sumber datanya serta cara-cara penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

#### **2.1 SEKTOR PERTANIAN**

Yang dicakup dalam sektor pertanian adalah segala perusahaan yang didapat dari alam dan merupakan barang-barang biologis atau hidup, dimana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi hidup sendiri atau dijual kepada pihak lain, tidak termasuk kegiatan yang tujuannya untuk hobi saja. Kegiatan pertanian pada umumnya berupa cocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan, pengambilan hasil laut, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar. Sektor Pertanian meliputi lima sub sektor yaitu : sub sektor Tanaman Bahan Makanan (Tanaman Pangan), Tanaman Perkebunan, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan dan Perikanan.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah bruto (NTB) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

adalah melalui pendekatan dari sudut produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan data harga dari masing-masing komoditi pertanian.

Secara umum, nilai output setiap komoditi diperoleh dari hasil perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga produsen komoditi bersangkutan. Menurut sifatnya, output diibedakan atas dua jenis yaitu output utama dan output ikutan. Total output suatu subsektor merupakan penjumlahan dari nilai output utama dan ikutan dari seluruh komoditi ditambah dengan nilai pelengkapannya. NTB suatu sub sektor diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap komoditi. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas dasar harga produsen terhadap seluruh biaya-biaya antara, yang didalam prakteknya biasa dihitung melalui perkalian antara rasio NTB terhadap output komoditi tertentu. Untuk keperluan penyajian data NTB atas dasar harga konstan 2000 ( $2000=100$ ), digunakan metode revaluasi yaitu metode dimana seluruh produksi dan biaya-biaya antara dinilai berdasarkan harga tahun dasar 2000. Khusus untuk subsektor Peternakan, penghitungan produksinya tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi diperoleh melalui suatu rumus persamaan yang menggunakan tiga peubah, yakni : banyaknya ternak yang dipotong ditambah selisih antara ekspor dan impor ternak.

### **2.1.1 Tanaman Bahan Makanan**

Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman bahan makanan lainnya. Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Samarinda, sedangkan harga produsen yang dipergunakan bersumber dari Survei Harga Perdagangan Besar dan sebagian bersumber dari instansi yang bersangkutan.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi, yaitu mengalikan jumlah produksi dengan harga masing-masing komoditi. Kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga berlaku pada setiap tahun. Biaya antara tersebut diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi.

### **2.1.2 Tanaman Perkebunan**

#### **a. Tanaman Perkebunan Rakyat**

Tanaman perkebunan rakyat mencakup semua jenis kegiatan tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat (tidak berbadan hukum).

Komoditi yang dihasilkan meliputi karet, kelapa, kopi, teh, tebu, tembakau, cengkeh, pala, kakao, lada, kayu manis, jarak dan kapas.

Data produksi dapat diperoleh dari Direktori Jenderal Perkebunan dan Dinas Perkebunan Kota Samarinda. Data harga perdagangan besar diperoleh dari Dantor Perkebunan dan BPS Kota Samarinda.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan produksi dengan harga pada tahun yang bersangkutan, kemudian dikurangi dengan biaya pengangkutan dan margin perdagangan. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengurangi output tersebut dengan biaya antaranya (metode produksi). Sedang output atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi.

#### b. Tanaman Perkebunan Besar

Tanaman perkebunan besar mencakup semua jenis kegiatan tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan yang mempunyai bentuk badan hukum dan dilakukan secara profesional. Komoditi yang dicakup meliputi: karet, kopi, teh, kelapa sawit, rami, serat manila, serta tanaman perkebunan lainnya. Produk ikutannya sama seperti pada tanaman perkebunan rakyat.

Data produksi dan harga perdagangan besar diperoleh dari Dinas Perkebunan setempat atau dari BPS Kota Samarinda. Rasio biaya antara dan rasio biaya pengangkutan dan margin perdagangan diperoleh dari survei khusus.

Penghitungan output dan NTB atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan produksi, sedang penghitungan output atas dasar harga konstan menggunakan cara revaluasi.

### **2.1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya**

Sub sektor peternakan meliputi kegiatan pemeliharaan ternak dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, digemukkan, baik untuk bibit serta dimanfaatkan untuk dipotong dan keperluan lainnya. Jenis ternak meliputi ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil ikutan lainnya termasuk kulit, tulang dan tanduk

Data yang digunakan berupa data populasi (yang dianggap sebagai stok awal dan akhir tahun), dapat diperoleh dari Dinas Peternakan Kota Samarinda. Karena data ekspor dan impor antar daerah masih sulit diperoleh maka ekspor neto diasumsikan sama dengan nol. Sedang data harga perdagangan besar perkomoditi bisa diperoleh dari Dinas Peternakan Kota Samarinda dan BPS Kota Samarinda.

Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong ditambah perubahan stok populasi ternak dan ekspor ternak netto. Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, populasi, produksi telur dan hasil ikutan lainnya diperoleh dari Dinas Peternakan Kota Samarinda. Harga produsen diperoleh dari survei harga perdagangan besar dan sebagian dari Dinas Peternakan Kota Samarinda.

Nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara jumlah produksi dengan harga produsen. Nilai produksi atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi. Nilai tambah bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengeluarkan biaya antara dari nilai produksi bruto.

#### **2.1.4 Kehutanan dan Hasil-hasilnya**

Subsektor ini mencakup semua kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk kegiatan perburuan. Hasil penebangan yang utama adalah kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), sedangkan hasil penebangan lainnya meliputi kayu bakar, arang dan bambu. Pemungutan hasil hutan antara lain damar, kopal dan nipah. Kegiatan perburuan meliputi penangkapan binatang

liar seperti buaya, babi hutan, biawak, menjangan, dan harimau, baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun diambil kulit, bulu, dan tanduknya (tidak termasuk rusa). Termasuk juga hasil buruan lainnya seperti pengambilan sarang burung, telur dan tanduk. Akan tetapi perburuan yang lebih menekankan unsur hobi tidak dimasukkan sebagai kegiatan perburuan.

Sumber data adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peredaran Hasil Hutan (UPTD-PPH) Samarinda, yaitu berupa data produksi dan harga produsen. Penghitungan nilai tambah sub sektor ini dilakukan melalui pendekatan produksi sama seperti yang dilakukan pada sub sektor lain sebelumnya. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi. Biaya antaranya diperoleh dari Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda. Nilai tambah brutto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi.

### **2.1.5 Perikanan**

Sub sektor ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya (kerang, siput, dan udang), baik yang berada di air tawar maupun air asin. Termasuk juga kegiatan pengambilan hasil-hasil binatang air seperti telur ikan, telur penyu, sirip ikan, bibit ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan mas

dan jenis ikan darat lainnya, ikan bandeng dan ikan payau lainnya, udang dan binatang berkulit keras lainnya, cumi-cumi dan binatang lunak lainnya, rumput laut serta tumbuhan lainnya.

Secara umum, sub sektor ini terbagi menjadi:

- (1). Penangkapan dan pengumpulan ikan darat
- (2). Penangkapan dan pengumpulan ikan laut
- (3). Pengolahan ikan basah laut maupun darat

Pada kegiatan penangkapan dan pengumpulan ikan darat dan ikan laut serta hasil-hasilnya adalah berupa ikan dan binatang air dengan kualitas basah dan segar. Sedangkan kegiatan pengolahan meliputi pengeringan dan penggaraman ikan. Proses pengasinan disini adalah dilakukan dengan memanaskan/ pengeringan melalui sinar matahari.

Data produksi diperoleh melalui Dinas Perikanan Kota Samarinda. Rasio biaya antara dan penyusutan diperoleh melalui Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dengan jalan mengalikan jumlah produksi dengan rata-rata harga masing-masing komoditi. Sedang nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi.

### **2.1.6 Jasa Pertanian**

Kegiatan jasa pertanian dikategorikan sebagai jasa-jasa khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan ekonomi pertanian berdasarkan suatu pungutan atau kontrak tertentu. Termasuk dalam jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian dengan operatornya dengan syarat pengelolaan dan resiko usaha tersebut dilakukan secara terpisah oleh orang lain (contohnya: pelelangan ikan, penyemprotan hama dan lain-lain). Kegiatan ini pada umumnya masih banyak dilakukan oleh rumah tangga tani dan sulit untuk memisahkan datanya dari kegiatan lainnya di bidang pertanian. Dalam penghitungan nilai tambah sektor pertanian, secara konsep nilai tambah jasa pertanian ini terdistribusi pada masing-masing sub-sektor (misalnya jasa dokter hewan pada sub-sektor peternakan, jasa memetik kopi pada sub sektor perkebunan). Akan tetapi karena sampai saat ini belum dapat diperoleh informasi yang lengkap mengenai jasa pertanian, maka untuk praktisnya nilai tersebut dianggap terwakili dalam besaran persentase *mark-up* tiap-tiap subsektor pertanian.

## **2.2 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**

Kegiatan pertambangan dan Penggalian adalah kegiatan yang mencakup penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral

dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Kegiatan ini dapat dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi. Sektor ini dikelompokkan dalam tiga sub sektor, yaitu sub sektor Pertambangan Migas, sub sektor Pertambangan Tanpa Migas, serta sub sektor Penggalian.

### **2.2.1 Pertambangan Migas**

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi meliputi kegiatan pencarian kandungan minyak bumi dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual dan dipasarkan. Komoditi yang dihasilkan adalah minyak bumi kondensat dan gas bumi.

Metode penghitungan yang digunakan adalah melalui pendekatan produksi. Output utama diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi, ditambah nilai barang dan jasa lainnya yang merupakan produk sampingan perusahaan pertambangan. Untuk beberapa komoditi tambang, harga produsen dianggap sama dengan harga ekspor (f.o.b) dengan alasan bahwa sebagian besar barang tambang yang dihasilkan dipasarkan ke luar negeri (di ekspor). Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengeluarkan biaya antara dari nilai produksi

bruto. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000, diperoleh dengan cara revaluasi. Kemudian melalui perkalian antara output dengan rasio NTB terhadap output tahun 2000 diperoleh NTB atas dasar harga konstan 2000.

### **2.2.2 Pertambangan Tanpa Migas**

Pertambangan tanpa migas meliputi pengambilan dan persiapan untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi serta seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Hasil kegiatan ini di Kota Samarinda adalah batubara. Sumber data mengenai produksi dan harga serta penghitungan output dan NTB atas dasar harga berlaku dan konstan sama seperti penghitungan sub sektor Pertambangan Migas.

### **2.2.3 Penggalian**

Subsektor ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi dan biasa disebut dengan Galian Golongan C. Hasil kegiatan ini antara lain batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat dan sebagainya.

Perkiraan output sub sektor ini dihitung dengan pendekatan tenaga kerja, yaitu melalui hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Data mengenai jumlah tenaga kerja diperoleh dari Bagian Perekonomian Pemda dan Dinas Pertambangan Kota Samarinda. Data mengenai rata-rata output dan rasio biaya antara diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh setelah mengeluarkan komponen biaya antara terhadap output sub sektor ini. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara revaluasi.

### **2.3 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN**

Kegiatan industri adalah kegiatan merubah bentuk baik secara mekanis maupun kimiawi dari bahan organik atau anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya. Proses tersebut dapat dilakukan dengan mesin atau dengan tangan, baik di buat di pabrik atau pada rumah tangga, termasuk perakitan bagian-bagian suku cadang barang-barang industri di pabrik seperti perakitan mobil dan alat elektronik.

Menurut kegiatan utama yang dihasilkan kegiatan sektor Industri pengolahan dikelompokkan menjadi sembilan kelompok komoditi sebagai berikut:

31. Industri makanan, minuman, dan tembakau
32. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit
33. Industri kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga
34. Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan
35. Industri kimia dan barang-barang dari bahan-bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik
36. Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara
37. Industri logam, mesin dan peralatannya
38. Industri barang dari logam dan peralatannya
39. Industri pengolahan lainnya

Pengelompokkan kegiatan industri dalam penghitungan pendapatan regional ini dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

- (1). Industri besar adalah perusahaan industri yang menggunakan tenaga kerja lebih besar atau mencapai 100 orang.
- (2). Industri sedang adalah dengan tenaga kerja 20-99 orang.
- (3). Industri kecil adalah dengan tenaga kerja 5-19 orang.
- (4). Industri kerajinan rumah tangga adalah dengan tenaga kerja 1-4 orang.

Tidak selamanya barang yang diolah segera menjadi barang yang selesai dalam waktu singkat. Banyak contoh barang yang memerlukan

waktu penyelesaian yang cukup lama. Seperti pembuatan kapal yang membutuhkan waktu tahunan dari mulai persiapan hingga tahap penyelesaian akhir. Berkaitan dengan contoh ini, tidak jarang pada akhir periode tahun kapal tersebut belum selesai dikerjakan atau dengan kata lain barang tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Secara prinsip, pengerjaan yang dilakukan oleh kegiatan industri, seperti pembuatan kapal, perakitan mobil, radio, perabot rumah tangga, dimasukkan sebagai output dari kegiatan industri. Penilaiannya adalah sebesar nilai barang pada komoditi setengah jadi tersebut. Pengolahan bahan mentah menjadi makanan dan minuman yang dilakukan oleh rumah tangga dan langsung dijual pada konsumen akhir dimasukkan ke dalam kegiatan perdagangan (restoran). Misalnya membuat pisang goreng dan rempeyek. Tetapi bila makanan tersebut dititipkan ke warung-warung maka kegiatan tadi tetap dimasukkan ke dalam sektor industri. Sedangkan pengolahan bahan mentah menjadi bukan makanan dan minuman walaupun langsung di jual kepada konsumen akhir tetap di masukkan kedalam kegiatan industri, misalnya membuat mainan anak-anak.

Metode penghitungan yang digunakan dalam sektor ini adalah pendekatan produksi, yaitu nilai tambah diperoleh dari output dikurangi dengan biaya antara. Output kegiatan industri dapat berbentuk barang dan dapat berbentuk jasa atau keduanya. Output

berbentuk barang adalah barang jadi dan barang dalam pengerjaan setengah jadi. Output berbentuk jasa antara lain adalah industri yang di berikan oleh pihak lain yaitu dengan jalan melakukan proses kegiatan industri dengan memakai alat produksi yang ada dalam perusahaan sendiri, sedangkan bahan mentahnya milik perusahaan industri lain, dan setelah diolah hasilnya akan diserahkan kembali kepada perusahaan pemesan tadi. Disamping penerimaan jasa yang ada kaitannya dengan kegiatan industri ada juga penerimaan jasa yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan industrinya. Jasa seperti ini misalnya keuntungan dari perdagangan (misalnya menjual kembali kelebihan bahan baku) dan penerimaan penyewaan ruangan milik perusahaan. Rincian yang dicakup dalam output perusahaan industri terdiri dari: barang yang dihasilkan; jasa industri yang diberikan pada pihak lain; selisih nilai stok barang setengah jadi; tenaga listrik yang dijual; keuntungan dari penjualan barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu pembelian; dan penerimaan lain dari jasa non industri.

Biaya antara sektor industri meliputi segala jenis pengeluaran yang bukan merupakan balas jasa faktor produksi dan penggunaan barang tersebut habis pakai dalam suatu proses produksi, usia pemakaiannya kurang dari satu tahun, dan nilai per unitnya relatif kecil. Sama halnya dengan output perusahaan industri, maka biaya antara juga dapat

berupa barang atau jasa. Biaya antara yang berupa barang terutama adalah bahan baku, bahan bakar, dan bahan penolong, sedangkan yang berbentuk jasa misalnya jasa industri dan penyewaan, ongkos angkutan, listrik dan telepon. Rincian biaya antara lain terdiri dari : bahan baku; bahan bakar; tenaga listrik dan gas; barang lainnya (selain bahan baku/penolong); jasa industri; sewa gedung, mesin dan alat-alat; dan jasa non industri lainnya.

Sering juga ditemui pada pembukuan perusahaan industri, pengeluaran-pengeluaran lainnya yang seharusnya merupakan balas jasa faktor industri, misalnya upah dan gaji serta pengeluaran oleh perusahaan pada pihak lain yang sifatnya cuma-cuma, misalnya sumbangan dimasukan dalam kelompok biaya antara. Untuk kedua jenis pengeluaran seperti upah dan gaji serta pemberian cuma-cuma tidak boleh dikelompokkan sebagai biaya antara, akan tetapi merupakan bagian dari nilai tambah bruto. Untuk mendapatkan nilai biaya antara sektor industri diperoleh dengan jalan mengalikan kuantum barang yang dipergunakan untuk proses produksi dengan harga per unit masing-masing barang tersebut. Khusus untuk jasa yang biasanya sukar untuk mengukur kuantumnya, maka nilai jasa sebagai biaya antara diperoleh langsung dari sejumlah nilai yang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain untuk jasa yang dipergunakan perusahaan tersebut.

Dalam penghitungan ini, untuk kelompok industri besar dan sedang disatukan, sedangkan untuk industri kecil dan rumahtangga dipisahkan. Data yang diperlukan untuk penghitungan nilai tambah sektor ini diperoleh dari Dinas Perindustrian, Indeks Harga Perdagangan Besar Sektor Industri, hasil Survei Industri Besar dan Sedang, serta Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga oleh BPS.

Untuk industri besar dan sedang, output maupun nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil survei tahunan industri besar dan sedang Badan Pusat Statistik. Sedangkan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan cara deflasi. Sedangkan untuk industri kecil dan kerajinan rumahtangga, output atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan mengalikan rata-rata output per tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja masing-masing tahun. Sedangkan nilai tambah bruto diperoleh melalui hasil pengurangan antara nilai output dengan biaya antaranya. Baik rata-rata output per tenaga kerja maupun rasio biaya antara diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi.

## **2.4 SEKTOR LISTRIK DAN AIR**

### **2.4.1. Listrik**

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan non PLN seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan pemerintah daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan), dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang di curi.

Kegiatan listrik non PLN dapat digolongkan menjadi dua yaitu : listrik non PLN 1 dan non PLN 2. Listrik non PLN 1 adalah listrik yang di bangkitkan oleh perusahaan listrik non PLN yang hasil/produksinya dibeli dan disalurkan oleh PLN. Sedangkan Listrik non PLN 2 adalah listrik yang dibangkitkan oleh perusahaan listrik non PLN yang hasilnya dijual dan disalurkan secara langsung oleh perusahaan itu sendiri ke konsumen.

Sering ditemukan adanya kelebihan arus listrik yang dihasilkan sebagai hasil ikutan dari proses produksi barang utama, misalnya pada perusahaan produksi industri, perusahaan gas negara, perusahaan air minum dan perusahaan pertambangan. Apabila sebagian atau keseluruhan dari kelebihan arus listrik ini dijual secara komersial

kepada pihak lain, seperti rumah tangga atau perusahaan, maka kegiatan ini dimasukkan sebagai kegiatan sektor listrik, tetapi apabila kelebihan tersebut digunakan sendiri tidak dimasukkan kedalam sub sektor listrik.

Data produksi, harga dan biaya antara subsektor ini dapat diperoleh dari laporan perusahaan listrik negara PLN dan perusahaan lain yang mengusahakan listrik (non PLN), Sensus Ekonomi 1996 (listrik non PLN), indikator ekonomi dan bulletin bulanan (data IHK) dan hasil Survei Industri Besar/Sedang (data listrik yang dijual oleh perusahaan industri) oleh Badan Pusat Statistik.

Metode penghitungan yang dilakukan untuk subsektor ini adalah pendekatan produksi, yaitu NTB yang diperoleh dari nilai output dikurangi dengan biaya antara. Nilai produksi kegiatan pelistrikan ini diperoleh dari perkalian antara kuantum listrik yang di bangkitkan dengan harga per unit listrik tersebut. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang di curi. Disamping itu, perusahaan mungkin mempunyai pendapatan lainnya dan kegiatan operasional atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pelistrikan dan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan utama pelistrikan tersebut. Misalnya hasil penerimaan dari jasa yang diberikan kepada pihak lain seperti penyewaan ruangan.

Biaya antara kegiatan pelistrikan adalah segala pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang habis terpakai dalam sekali proses produksi, usia pemakaiannya kurang dari setahun dan biaya per unit relatif kecil. Oleh karena output dihitung berdasarkan listrik yang dibangkitkan, maka biaya antara termasuk listrik yang dipakai sendiri dalam proses produksi, hilang dalam transmisi dan distribusi, di samping biaya operasi dan pemeliharaan mesin dan alat pengeluaran operasional lainnya.

Nilai tambah bruto diperoleh dengan mengurangi output terhadap biaya antara. Perhitungan atas dasar harga konstan menggunakan metode revaluasi, yaitu output diperoleh dari perkalian antara produksi masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar. Cara lain adalah menggunakan metode deflasi yaitu dengan menggunakan indeks tarif listrik gabungan tertimbang dari masing-masing jenis tarif tiap tahun sebagai deflator atau bisa juga dengan cara ekstrapolasi, dimana indeks produksi gabungan tertimbang masing-masing jenis produksi tiap tahun digunakan sebagai ekstrapolator.

#### **2.4.2 Air Minum**

Kegiatan subsektor ini mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya yang menghasilkan air minum serta pendistribusian dan penyaluran ke rumah tangga, instansi pemerintah

dan instansi swasta, baik yang dilakukan oleh perusahaan Air Minum (PAM) maupun bukan PAM. Kegiatan ini mencakup usaha air bersih melalui sumur artesis yang dikomersilkan. Pembotolan air mineral dan air yang mengandung karbonat tidak termasuk dalam subsektor ini tetapi dimasukkan dalam sektor Industri Pengolahan.

Data produksi, harga dan biaya antara sub sektor ini diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda dan perusahaan lainnya yang mengusahakan air minum, dan Indikator Ekonomi.

Metode penghitungan yang digunakan untuk subsektor ini adalah pendekatan produksi yaitu NTB diperoleh dari nilai output dikurangi biaya antara. Nilai produksi kegiatan ini diperoleh dari perkalian antara kuantum air minum yang disalurkan dengan harga per unitnya, termasuk output lainnya yang diterima perusahaan yang berasal dari kegiatan lain seperti pemeriksaan kualitas tanah dan penyewaan ruangan. Biaya antara adalah pemakaian bahan bakar dan bahan penolong yang habis dipakai dalam proses pembersihan dan permunian. Bahan baku utama adalah bahan kimia yang banyak dipakai untuk menyaring air menjadi bersih dan memenuhi syarat higienis, juga bahan bakar dan pelumas lainnya yang dipakai untuk mesin penggerak termasuk biaya pemeliharaan mesin dan pengeluaran operasional lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian jumlah produksi dengan harga masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan mengalikan rasio nilai tambah terhadap output, begitu juga halnya dalam memperkirakan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku.

## **2.5. SEKTOR BANGUNAN/KONSTRUKSI**

Sektor bangunan mencakup kegiatan konstruksi di wilayah domestik suatu daerah yang dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai .

Kegiatan konstruksi meliputi pembuatan, pembangunan, pemasangan dan perbaikan (berat maupun ringan) semua jenis konstruksi seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, jalan, jembatan, pelabuhan (laut atau udara), terminal, monumen dan instalansi jaringan listrik, gas air dan jaringan komunikasi serta bangunan lainnya.

Sub kontraktor yang mengerjakan sebagian dari suatu pekerjaan yang lebih besar, misalnya pemasangan instalasi listrik dari suatu gedung, pemasangan saluran telepon, pemasangan pipa minyak dan

pembuatan pondasi diklasifikasikan sebagai sektor konstruksi. Demikian juga unit-unit yang terutama melakukan kegiatan konstruksi untuk perusahaan induknya dan dapat melaporkan data dari semua kegiatannya secara terpisah.

Untuk menghitung nilai tambah sektor bangunan, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan arus barang (*commodity flow*). Untuk pendekatan arus barang, sumber data yang dapat digunakan antara lain: kayu dan bambu dari dinas kehutanan, bahan bangunan dalam daerah dari publikasi statistik tahunan industri dan untuk bahan bangunan impor didapat dari Seksi Statistik industri, sedang struktur ongkos biaya lainnya dari Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda. Untuk pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan, sumber data yang digunakan adalah hasil sensus atau survei perusahaan konstruksi mengenai data rasio struktur input dan rata-rata nilai produksi (output) per perusahaan atau tenaga kerja.

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi dipakai untuk memperoleh nilai tambah sektor bangunan dengan cara output sektor dikurangi biaya antaranya. Untuk mengestimasi output sektor ini ada dua alternatif : (i) meneliti

perusahaan bangunan/konstruksi yang berdomisili di suatu daerah; dan (ii) meneliti perusahaan bangunan/konstruksi yang membangun mengerjakan proyek-proyek di daerah tersebut. Pada alternatif pertama output didefinisikan sebagai jumlah nilai pendapatan dari seluruh perusahaan konstruksi yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Hasil dari kedua cara perhitungan tersebut dapat berbeda, disebabkan adanya perusahaan konstruksi di luar daerah yang melakukan kegiatan di daerah tersebut atau sebaliknya.

Output dari kegiatan konstruksi pada satu tahun atas dasar berlaku adalah nilai semua pekerjaan yang telah dilaksanakan di suatu daerah selama tahun tersebut tanpa memperhatikan bangunan yang dikerjakan tersebut telah selesai atau belum. Jadi dari kegiatan konstruksi yang kadang-kadang memakan waktu lebih dari satu tahun, harus dapat ditentukan output dari satu tahun tertentu. Sebagai gambaran dapat dicontohkan sebagai berikut : Nilai bangunan tempat tinggal tahun 2005 adalah nilai bangunan tempat tinggal yang pembuatannya dilaksanakan seluruhnya dalam tahun 2005 mulai dikerjakan sampai selesai (A). Nilai bangunan kantor tahun 2005 adalah nilai bangunan kantor yang pembuatannya mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dikerjakan pada tahun 2004 (B). Nilai jalan 2005 adalah pekerjaan bangunan jalan yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun

2005. Output jalan pada tahun 2005 yaitu bangunan yang masih dalam proses pengerjaan barang setengah jadi (C). Output dari bangunan irigasi tahun 2005 yang pembuatannya dimulai tahun 2004 dan masih terus dikerjakan untuk diselesaikan sampai jadi pada tahun berikutnya adalah nilai bangunan dalam keadaan belum selesai pada akhir tahun dikurangi nilai bangunan tersebut pada awal tahun (D). Output kegiatan konstruksi pada tahun 2005 meliputi bangunan yang sudah jadi maupun yang masih dalam proses pengerjaan. Dalam contoh diatas output konstruksi tahun 2005 meliputi A, B, C dan D pada tahun yang bersesuaian.

Biaya antara sektor bangunan terdiri dari nilai pemakaian barang dan jasa yang telah digunakan dalam melakukan kegiatan selama satu tahun kalender. Prinsipnya biaya antara di sini sama seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya dalam pendekatan arus barang. Secara umum dapat juga digolongkan sebagai bahan pokok atau bahan baku untuk bangunan, bahan penolong, bahan bakar, bahan-bahan lainnya termasuk alat tulis untuk keperluan administrasi, jasa-jasa dan sewa alat dan ongkos-ongkos lainnya.

Output dan NTB atas dasar harga konstan bisa diperkirakan dengan metode ekstrapolasi dengan indeks banyaknya perusahaan/tenaga kerja sebagai ekstrapolator atau dengan metode deflasi dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) sebagai deflator.

b. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, NTB sektor bangunan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut dalam proses produksi. Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian NTB, kecuali faktor diatas termasuk pula komponen penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung neto. Upah dan gaji sektor ini dapat diestimasi dengan jalan mengalikan jumlah tenaga kerja dengan rata-rata jumlah hari kerja dalam setahun dan rata-rata upah/gaji sektor bangunan. Tenaga kerja dapat dirinci menjadi tenaga kerja administrasi, tenaga kerja lapangan termasuk tenaga kerja lepas/harian dan pekerja bebas/pemilik/pengusaha. Lapangan usaha bangunan yang berbentuk badan usaha atau perusahaan dapat dengan jelas memisahkan tenaga kerja administrasi dan operasi, sehingga dapat diperhitungkan dengan cermat balas jasa tenaga kerjanya. Lain halnya dengan pekerja bebas atau pemborong/pengusaha di bidang konstruksi yang biasanya langsung bertindak sebagai pekerja lapangan akan sulit memisahkan balas jasa dan surplus usahanya.

Ketiga komponen yaitu sewa tanah, modal dan keuntungan dikenal sebagai *operating surplus* atau surplus usaha. Penyusutan merupakan

perkiraan susutnya barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada produsen atas produksinya, sedangkan subsidi merupakan bantuan pemerintah untuk menambah pendapatan produsen atau kegiatan produksi. Pajak tidak langsung neto adalah nilai pajak yang dibayarkan dikurangi dengan subsidi yang diterima. Nilai output dan NTB atas dasar harga konstan dapat diestimasi dengan metode deflasi atau ekstrapolasi .

c . Pendekatan Arus Barang.

Pendekatan ini adalah suatu metode penghitungan nilai output berdasarkan input yang digunakan dalam sektor tersebut yang diperoleh dari output sektor lain. Input dapat dibedakan menjadi dua yaitu input primer dan input antara dan jumlah keduanya akan sama dengan output. Input antara sektor bangunan dikelompokkan menjadi: bahan-bahan dari sektor pertanian seperti kayu gelondongan, bambu dan sebagainya; bahan-bahan hasil penggalian seperti pasir, tanah uruk dan batu; bahan bangunan produksi industri dalam negeri; bahan bangunan impor, aspal dan bahan lain-lain. Output dan NTB dihitung setelah penggunaan masing-masing komoditi biaya lain-lain diperoleh nilainya. Nilai bahan bangunan impor yang dipakai sebagai input diperoleh dari hasil perkalian antara rasio alokasi komoditi ke sektor bangunan dengan nilai impor. Nilai

komoditi impor merupakan jumlah *cost, insurance and freight* (CIF), bea masuk, pajak penjualan (ppn) dan pajak-pajak lainnya. Penilaian yang digunakan adalah nilai di lokasi penggunaan, oleh karena itu nilai perkalian antara rasio alokasi komoditi impor dengan nilai impor masih harus ditambah dengan margin perdagangan dan biaya pengangkutan serta biaya lainnya. Rasio alokasi dan margin tersebut diperoleh dari SKPR Kota Samarinda. Nilai input menurut harga konstan diperoleh dengan mendeflasikan nilai menurut harga berlaku. Deflator yang digunakan adalah rata-rata tertimbang indeks harga perdagangan besar atau indeks nilai unit. Nilai bahan bangunan produksi dalam negeri yang dipakai sebagai input diperoleh dari hasil perkalian antara rasio alokasi komoditi domestik atas dasar harga pembeli. Seperti halnya bahan bangunan impor, nilai yang digunakan adalah nilai di lokasi penggunaan maka masih ditambah dengan margin perdagangan dan biaya pengangkutan serta biaya lainnya yang di peroleh dari SKPR. Nilai input menurut harga konstan diperoleh dengan mendeflasikan nilai menurut harga berlaku. Deflator yang digunakan adalah rata-rata tertimbang indeks harga perdagangan besar bahan bangunan produksi dalam negeri. Kedua pendugaan tersebut di lakukan apabila data tersedia secara *series*, bila data tidak tersedia pendugaan dihitung berdasarkan tahun dasar. Pendugaan tahun-tahun lain di buat dengan cara ekstrapolasi

terhadap nilai bahan. Pendugaan atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menginflasikan nilai yang di peroleh dengan cara tersebut.

## **2.6 SEKTOR PERDAGANGAN, RESTORAN DAN PERHOTELAN**

### **2.6.1 Perdagangan**

Subsektor perdagangan mencakup kegiatan menjual dan membeli barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran atau pendistribusian tanpa merubah bentuk barang tersebut. Subsektor perdagangan dibagi menjadi dua kelompok yaitu: perdagangan besar dan eceran.

Perdagangan besar mencakup kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan pedagang eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah bentuk, baik barang baru maupun bekas.

Bila menggunakan metode arus barang, ouput sektoral yang diperoleh pada saat menghitung nilai tambah sektor yang bersangkutan. Rasio margin perdagangan dan rasio barang yang

diperdagangkan dapat di peroleh dari Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda atau berdasarkan Tabel Input-Output, serta dinas/instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bila menggunakan metode pendekatan produksi, banyaknya perusahaan/tenaga kerja di estimasi berdasarkan hasil Sensus Ekonomi atau dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rasio biaya antara dan NTB dapat di peroleh dari SKPR Kota Samarinda.

Output atau margin perdagangan merupakan selisih antara nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Sedangkan biaya antaranya adalah seluruh biaya yang digunakan untuk kepentingan usaha perdagangan, seperti perlengkapan tulis menulis, bahan mengepak dan pembungkus, rekening listrik dan telepon, serta biaya iklan. Pada umumnya perhitungan output subsektor perdagangan (untuk perhitungan PDB Nasional) dilakukan dengan cara pendekatan arus barang yaitu dengan menghitung besarnya margin perdagangan barang-barang yang diperdagangkan dari sektor pertanian, pertambangan, dan penggalian, industri pengolahan (tidak termasuk LNG, methanol dan sebagian hasil pengilangan yaitu bahan bakar avtur) serta barang-barang dari impor yang diperdagangkan. Sehingga dalam pendekatan ini dibutuhkan rasio margin

perdagangan, dan rasio jumlah barang yang diperdagangkan (*marketed surplus ratio*). sedangkan NTB-nya diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan total output.

Secara sistematis perhitungan output dan NTB dengan pendekatan arus barang adalah sebagai berikut :

1. Menghitung output (baik konstan maupun berlaku) untuk sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri dan impor.
2. Menghitung output (baik konstan maupun berlaku) dengan cara mengalikan output sektoral dengan rasio barang yang diperdagangkan.
3. Menghitung NTB (baik konstan maupun berlaku) dengan cara mengalikan total output sektoral dengan rasio NTB nya.

Untuk penghitungan regional, output dan NTB atas dasar harga berlaku dapat diestimasi dengan cara lain yaitu menggunakan metode/pendekatan produksi. Banyaknya perusahaan/tenaga kerja merupakan indikator produksi dan rata-rata output per indikator produksi sebagai indikator harganya. Perkalian banyaknya indikator produksi dengan rata-rata output per indikator produksi merupakan output. NTB diperoleh dengan mengurangkan output dengan biaya antaranya. Untuk mendapatkan nilai atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi atau deflasi dimana Indeks Harga

Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai deflatornya.

### **2.6.2 Hotel**

Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan hostel. Termasuk pula penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap dimana kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan yang datanya sulit dipisahkan. Penyediaan penginapan yang diusahakan oleh yayasan atau pemerintah juga dikelompokkan disini bila segala macam keterangan dan data mengenai kegiatan ini dapat dipisahkan dengan kegiatan utamanya

Data mengenai indikator produksi dan harga dapat diperoleh dari instansi/asosiasi yang terkait atau Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) atau dari Tabel Input Output.

NTB dapat diperoleh dengan pendekatan produksi. Indikator produksi yang dapat digunakan dalam jumlah malam kamar, jumlah tempat tidur, jumlah hotel atau penginapan, jumlah tenaga kerja dan jumlah tamu yang menginap. Indikator harganya adalah rata-rata tarif per

malam kamar, rata-rata output per tempat tidur, rata-rata output perhotel, rata-rata output per tenaga kerja, dan rata-rata output tamu yang menginap.

Output atas dasar harga berlaku subsektor hotel dapat diperoleh dengan mengalikan indikator produksi dan indikator harganya. NTB diperoleh dengan mengalikan output dengan rasio nilai tambahnya. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi atau metode deflasi dengan indeks tarif hotel tertimbang sebagai deflatornya.

### **2.6.3 Restoran**

Kegiatan subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan baik dengan tempat tetap maupun tidak tetap, termasuk pedagang makanan/minuman keliling. Kegiatan yang termasuk dalam subsektor ini adalah rumah makan, warung nasi, warung sate, warung kopi, katering, kantin, tukang bakso, tukang rujak dorongan dan tukang es. Penyediaan makanan dan minuman jadi serta usaha katering, pelayanan restoran kereta api dan kantin yang merupakan usaha sampingan, sejauh datanya dapat dipisahkan, masuk dalam kategori subsektor ini.

Data mengenai indikator produksi dapat diperoleh dari sensus atau asosiasi yang terkait, sedangkan indikator harga dan rasio NTB dapat diperoleh dari SKPR, survei khusus atau Tabel Input Output. Untuk konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah dapat diperoleh dari hasil SUSENAS dan jumlah penduduk dapat diperoleh dari hasil Sensus Penduduk.

NTB dapat diperoleh dengan pendekatan produksi. Indikator produksi yang dapat digunakan adalah jumlah tenaga kerja, jumlah restoran atau jumlah pengunjung yang datang ke restoran. Sedangkan indikator harga yang digunakan adalah rata-rata output per tenaga kerja, rata-rata output per restoran, atau rata-rata output per pengunjung.

Output atas dasar harga berlaku dapat diperoleh berdasarkan perkalian antara indikator produksi dan indikator harga. Sedangkan NTB-nya dihitung berdasarkan perkalian rasio NTB dengan outputnya. Output dan NTB atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan metode ekstrapolasi dengan indeks produksi (sesuai dengan indikator produksi yang dipakai) sebagai ekstrapolatornya.

Selain cara di atas, output subsektor restoran atas dasar harga berlaku dapat pula diperkirakan berdasarkan indikator konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah. Dalam cara ini konsumsi makanan dan

minuman jadi di luar rumah dianggap sebagai output dari restoran. Penghitungan pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi di luar rumah atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan cara mengalikan pengeluaran bahan makanan dan minuman per kapita selama setahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Atau dengan kata lain jumlah penduduk sebagai indikator produksi dan rata-rata pengeluaran makanan dan minuman per kapita sebagai indikator harga. Sedangkan untuk harga konstannya diperoleh dengan metode deflasi, dimana IHK kelompok makanan sebagai deflatornya, sedangkan NTB-nya dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan output.

## **2.7 SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI**

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang baik melalui darat, laut dan udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

### **2.7.1 Angkutan Jalan Raya**

Jenis kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum angkutan jalan raya baik bermotor maupun tidak bermotor. Jenis kegiatan bermotor antara lain meliputi bus, taksi, truk, mikrolet, dan sejenisnya, sedangkan kendaraan tidak bermotor meliputi becak, delman/dokar,

gerobak/pedati dan sebagainya. Kendaraan tersebut dapat merupakan kendaraan wajib uji baik yang memakai plat nomor kuning (umum) maupun plat hitam (pribadi) yang tujuannya untuk usaha komersial. Kegiatan penyewaan/*charter* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi juga termasuk dalam kegiatan ini. Tetapi kegiatan kendaraan operasi perusahaan yang diusahakan sebagai satu satuan usaha dalam kegiatan perusahaan tersebut (seperti truk mengangkut pasir dalam usaha penggalian, jasa bongkar muat) tidak termasuk dalam kegiatan ini.

Data mengenai jumlah kendaraan bermotor diperoleh dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), dan Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan rata-rata output per kendaraan dan rasio biaya antara diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) terhadap perusahaan angkutan jalan raya (termasuk pengemudi).

Dengan metode produksi, output angkutan jalan raya dasar harga berlaku untuk kendaraan bermotor atau tidak bermotor merupakan perkalian indikator produksi (jumlah armada/kendaraan) dengan indikator harga (rata-rata output per armada) untuk masing-masing jenis angkutan. Jika data kendaraan tidak bermotor tidak tersedia maka outputnya dapat diperkirakan dengan menggunakan hasil pengolahan SKPR yaitu persentase output kendaraan tidak bermotor terhadap kendaraan bermotor.

Output atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- i. metode revaluasi (mengalikan jumlah armada/ kendaraan yang beroperasi dengan rata-rata output per armada tahun dasar)
- ii. metode ekstrapolasi (indeks tertimbang jumlah armada/kendaraan sebagai ekstrapolator).
- iii. metode deflasi (indeks harga konsumen komponen pengangkutan sebagai deflator)

Selanjutnya NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. Jika struktur input tahun perjalanan relatif sama dengan tahun dasar, maka metode ekstrapolasi ataupun metode deflasi bisa digunakan langsung terhadap NTB.

### **2.7.2 Angkutan Sungai , Danau dan Penyeberangan.**

Jenis kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kendaraan/kapal sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk juga di sini kegiatan penyewaan (*charter*) kapal baik dengan maupun tanpa kemudi. Tidak termasuk disini kegiatan lain yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti pelabuhan sungai, perbaikan dan pemeliharaan kapal, baik yang dilakukan dibawah satu satuan usaha dengan angkutan sungai maupun secara terpisah.

Data mengenai jumlah armada kapal sungai baik yang bermotor maupun tidak bermotor dapat diperoleh dari Kantor Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP). Data mengenai rata-rata output per kapal dan rasio NTB diperoleh dari hasil survei khusus (SKPR) terhadap perusahaan/pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan.

Dengan pendekatan produksi, output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan indikator produksi (jumlah armada) dengan indikator harga (rata-rata output per armada). Untuk menjaga konsisten hasil penghitungan antar daerah, digunakan data jumlah penumpang dan barang yang berangkat dari daerah/tempat penyeberangan asal. Output atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan metode revaluasi ataupun metode ekstrapolasi. NTB diperoleh dengan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

### **2.7.3 Angkutan Laut**

Kegiatan yang mencakup subsektor ini pengangkutan penumpang barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi didalam dan keluar daerah. Kegiatan yang dikenal dengan nama pelayaran ini hanya mencakup perusahaan pelayaran nasional. Menurut daerah operasinya dibedakan atas pelayaran samudera (antar region), pelayaran nusantara (antar pulau/daerah) dan pelayaran khusus, pelayaran perintis, pelayaran lokal dan pelayaran rakyat. Tidak

termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran lain yang berada dalam satu satuan usaha, dimana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang dari kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit dipisahkan, misalnya tanker-tanker Pertamina untuk angkutan dalam negeri, kapal milik perusahaan ikan dan angkutan khusus lainnya.

Data mengenai indikator produksi diperoleh dari laporan setiap pelabuhan, sedangkan data mengenai rata-rata output per indikator produksi dan rasio NTB diperoleh dari survei khusus terhadap perusahaan angkutan laut.

Dengan pendekatan produksi, output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan indikator produksi (jumlah barang dan penumpang yang diangkut) dengan indikator harga (rata-rata output per indikator produksi). Untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan antar daerah, digunakan data jumlah penumpang dan barang yang berangkat dari setiap pelabuhan muat. Output atas dasar harga konstan dapat di peroleh dengan metode ekstrapolasi. NTB di peroleh dengan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

#### **2.7.4 Angkutan Udara**

Jenis kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan

oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut (perusahaan penerbangan nasional). Menurut wilayah operasinya dibedakan atas penerbangan dalam negeri (domestik) dan luar negeri (internasional). Termasuk juga penggunaan pesawat terbang untuk di *charter*/disewa baik secara sebagian maupun keseluruhan. Termasuk disini kegiatan lainnya yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang datanya sulit dipisahkan, seperti Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMKU) baik untuk angkutan penerbangan yang sifatnya tidak komersial, yang hanya digunakan untuk kepentingan suatu organisasi/perkumpulan seperti penerbangan milik misionaris dan perkumpulan terbang layang.

Data mengenai indikator produksi dan harga dapat diperoleh dari laporan pengusaha dan pengelola pelabuhan udara. Rasio NTB diperoleh dari survei khusus terhadap perusahaan penerbangan.

Dengan pendekatan produksi, output atas dasar harga berlaku merupakan jumlah penerimaan perusahaan angkutan udara di daerah tersebut baik yang mempunyai klasifikasi operasi berjadwal maupun tidak berjadwal (*charter*). ini bisa diperkirakan dengan mengalikan indikator produksi dengan indikator harga. Indikator produksi adalah jumlah muatan penumpang dan barang yang dimuat yang dirinci menurut berat dan jarak tempuhnya. Indikator harga adalah rata-rata output per unit indikator produksi dari muatan dan barang. Pedapatan

lain yang diperoleh dari sewa dan dari usaha lain yang bukan dari kegiatan angkutan diestimasi dengan menggunakan rasio terhadap pendapatan utama. Output atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan metode revaluasi ataupun metode ekstrapolasi. NTB diperoleh dengan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

### **2.7.5 Jasa Penunjang Angkutan**

Jenis kegiatan yang dicakup disini adalah kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar usaha pengangkutan dan jasa penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan pengangkutan, yang meliputi pelayanan jasa terminal dan parkir, keagenan, ekspedisi, bongkar muat, pergudangan, jalan tol dan kegiatan lainnya yang belum tercakup.

#### **1. Terminal dan Parkir**

Kegiatan ini meliputi jasa pelayanan untuk muatan barang dan penumpang termasuk pelayanan kendaraannya. Jasa terminal dan parkir merupakan fasilitas berlabuh untuk menaik-kan/menurunkan muatan pada: stasiun (untuk angkutan rel dan angkutan darat), pelabuhan (angkutan laut), pelabuhan sungai/laut (angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut) dan pelabuhan udara (angkutan udara). Jasa penunjang ini pada umumnya dilaksanakan

oleh pemerintah melalui lembaga/badan usaha yang ditunjuk seperti Perum Angkasa Pura, PD Parkir Jaya dan BPP Pelabuhan Laut.

Data mengenai indikator produksi dan pendapatan berupa laporan keuangan (rugi laba) didapat dari dinas/badan yang menangani kegiatan-kegiatan tersebut seperti terminal dan parkir dari Dinas Perhubungan, pelabuhan sungai dari ASDP, pelabuhan laut dari PT Pelindo, pelabuhan udara dari Perum Angkasa Pura atau dari Pemda, sedangkan data indikator harga dan rasio struktur input didapat dari survei khusus.

Pada umumnya output atas dasar harga berlaku diperkirakan berdasarkan pendekatan produksi yang sesuai. Pada terminal dan parkir, output diperoleh dengan mengalikan jumlah armada/kendaraan dengan tarif karcis retribusi yang dikenakan. Pada pelabuhan sungai, output diperoleh dengan mengalikan jumlah kapal yang dilayani dengan rata-rata uang labuh, tambat dan penyediaan fasilitas lainnya. Pada pelabuhan laut, output diperoleh dari jasa pelayanan kapal laut beserta muatannya termasuk penyediaan fasilitas pelabuhan lainnya, sehingga pendapatannya berasal dari uang labuh, uang tambat, uang demarga, uang pandu, angkutan bandar, penjualan air tawar dan fasilitas lain di pelabuhan laut. Pada pelabuhan udara, output di peroleh dari jasa pelayanan pesawat udara yang berlabuh baik datang maupu berangkat, sehingga

pendapatannya berasal dari bea pendapatan, bea penempatan, bea lampu landasan, bea pelayanan penerbangan dan penyediaan fasilitas lain di pelabuhan udara.

## 2. Keagenan

Keagenan merupakan kegiatan jasa penghubung antara produsen dan konsumen/pemakai angkutan. Menurut jenisnya kegiatan ini dibedakan menjadi tiga yaitu keagenan kendaraan/ armada, keagenan penumpang dan keagenan barang. Keagenan barang pada umumnya berkaitan dengan kegiatan pengangkutan laut dan udara, sedangkan kegiatan (keagenan penumpang dan barang) sudah tercakup pada kegiatan angkutan utamanya masing-masing.

Guna memperoleh data berupa laporan keuangan (rugi/laba) perusahaan, perlu dilakukan survei khusus untuk mendapatkan indikator serta rasio yang diperlukan.

Output merupakan perkalian antara jumlah indikator produksi yang berupa jumlah armada, jumlah penumpang, jumlah barang yang dilayani dengan rata-rata pendapatan yang di terima (contohnya komisi).

## 3. Ekspedisi

Ekspedisi merupakan kegiatan pelayanan muatan barang yang berhubungan dengan pengurusan surat atau dokumen termasuk jasa pengirimannya. Kegiatan ini dikenal dengan nama EMKA untuk muatan kereta api, EMKL untuk muatan kapal laut dan EMKU untuk muatan kapal udara.

Data mengenai indikator produksi diperoleh dari kegiatan masing-masing pelabuhan sedang data mengenai indikator harga dan rasio struktur input diperoleh dari survei khusus.

Output bisa diperoleh dengan mengalikan indikator produksi yang berupa banyaknya muatan barang yang dilayani dengan rata-rata output per unit indikator produksinya.

#### 4. Bongkar Muat

Jasa penunjang ini meliputi kegiatan membongkar dan memuat barang dari/ke kendaraan angkutannya. Jasa ini adakalanya dilakukan oleh tenaga manusia ataupun dengan menggunakan peralatan khusus dan beroperasi di batas wilayah pelabuhan. Kegiatan ini dipisahkan menjadi bongkar muat angkutan darat, bongkar muat angkutan sungai, angkutan laut dan angkutan udara. Bila kegiatan ini menjadi satu dengan kegiatan angkutan utamanya (sulit untuk dipisahkan) maka tidak dimasukkan dalam jenis kegiatan ini.

Data mengenai indikator produksi diperoleh dari lapangan kegiatan perusahaan bongkar muat sedang data mengenai indikator harga (rata-rata output per ton barang), rasio pengeluaran bongkar muat oleh angkutan jalan raya dan rasio struktur input diperoleh dari survei khusus. Output bisa diestimasi dari hasil perkalian jumlah muatan barang yang dilayani (dibongkar dan muat) dengan rata-rata output per unit indikator produksinya.

## 5. Pergudangan

Jenis kegiatan ini meliputi kegiatan penyediaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan yang disewakan kepada umum, baik untuk gudang terbuka maupun gudang tertutup yang berada di wilayah pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Usaha pergudangan tersebut untuk melayani muatan barang pelayaran dan penerbangan domestik maupun asing. Gudang terbuka misalnya berupa lapangan terbuka sedangkan gudang tertutup adalah gudang yang dibatasi dinding (dalam suatu bangunan tertutup), misalnya gudang-gudang pendingin (*cold storage*).

Data mengenai indikator produksi dapat diperoleh dari kegiatan pergudangan sedang data mengenai indikator harga dan rasio struktur input diperoleh dari survei khusus.

Output bisa diperoleh dengan mengalikan indikator produksi (jumlah barang yang digudangkan) dengan indikator harga (rata-rata output per unit indikator produksinya).

### **2.7.6 Komunikasi**

Subsektor ini dibagi menjadi dua kegiatan utama yaitu Telekomunikasi dan PT Posindo serta Jasa Penunjang Komunikasi.

#### **a. Telekomunikasi dan PT Posindo**

Jenis kegiatan telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telepon, telex, telegram dan kegiatan lain yang diusahakan oleh PT. Telekomunikasi dan PT. Indosat. PT. Telekomunikasi melayani kegiatan ini untuk wilayah domestik, sedangkan PT. Indosat untuk pelayanan internasional. Jenis kegiatan PT Posindo meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel, paket pos dan sebagainya. Termasuk di sini pemberian jasa kepada pihak ketiga seperti jasa giro, jasa tabungan, pemungutan iuran radio dan televisi dan lainnya yang diusahakan oleh PT Posindo.

Output dan struktur input Pos & Giro diperoleh dari laporan keuangan tahunan Perum Pos & Giro. Output telekomunikasi merupakan

penjumlahan dari penerimaan atas kegiatan telekomunikasi (oleh PT. Telekomunikasi dan PT. Indosat).

Metode estimasi menggunakan pendekatan produksi melalui pendekatan perusahaan, output atas dasar harga berlaku kegiatan ini merupakan penjumlahan dari penerimaan atas kegiatan pos dan giro. NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan metode ekstrapolasi.

b. Jasa Penunjang Komunikasi

Kegiatan ini mencakup jasa kegiatan lain yang menunjang kegiatan telekomunikasi dan pos dan giro yang belum tercakup dari kegiatan tersebut, antara lain penjualan benda pos dan usaha telekomunikasi yang dilakukan oleh perorangan/badan usaha tertentu lainnya (wartel). Kegiatan tersebut berupa usaha perantara/penghubung antara produsen dan konsumen/pemakai jasa pos dan telekomunikasi.

Data output, indikator produksi, indikator harga dan struktur input dapat diperoleh dari survei khusus terhadap pengusaha-pengusaha tersebut.

Output kegiatan ini bisa diestimasi melalui pendekatan produksi dengan memperoleh laporan keuangan perusahaan, output tersebut

berupa pendapatan dari hasil komisi atas pelayanan yang di berikan. NTB diperoleh dari pengurangan output dengan biaya antaranya. Output dan NTB atas dasar harga konstan diestimasi dengan metode ekstrapolasi

## **2.8 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN**

Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya disebut juga sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan berupa penarikan dana dari masyarakat dan penyalurannya. Dalam klafisifikasi baru, sektor ini berubah menjadi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang terdiri atas subsektor bank, lembaga keuangan tanpa bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan.

### **2.8.1 Bank**

Kegiatan yang dicakup adalah kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan jangka panjang, mengirim uang, memberi dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga dan sebagainya.

Output, struktur input dan NTB atas dasar harga berlaku setiap tahun diperoleh dari laporan Bank Indonesia (BI) dan dibedakan menurut pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan.

Output adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, biaya pengiriman wesel dan sebagainya. Dalam output bank dimasukkan pula imputasi jasa bank yang besarnya sama dengan selisih antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan karena apabila output hanya didasarkan pada jasa pelayanan yang benar-benar diterima bank maka bank tidak akan mampu menutupi biaya operasioanalnya. Dalam penghitungan BI, output bank terdiri dari:

- imputasi jasa,
- penerimaan neto dari transaksi devisa,
- provisi dan komisi
- pendapatan operasional lainnya.

NTB atas dasar harga konstan diperkirakan dengan metode deflasi, dimana komponen biaya tenaga kerja menggunakan deflator Indeks Harga Konsumen (IHK) umum, sedangkan komponen biaya lainnya seperti surplus usaha, pajak dan penyusutan menggunakan deflator Indeks Harga Implisit PDRB subsektor bank

## **2.8.2 Lembaga Keuangan Tanpa Bank**

Subsektor lembaga keuangan bukan bank mencakup kegiatan asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam dan lembaga pembiayaan (sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit).

### **a. Asuransi**

Asuransi adalah salah satu jenis usaha keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko atas terjadinya kerugian menanggung resiko atas terjadinya kerugian finansial terhadap sesuatu barang atau jiwa yang disebabkan terjadinya musibah/kecelakaan atas barang atau orang, sehingga mengakibatkan terjadinya kematian. Jasa asuransi ini dapat dibedakan menjadi jasa asuransi jiwa, asuransi sosial serta asuransi kerugian (termasuk agen/broker, unit pengatur dana pensiun yang berdiri sendiri, adjuster dan sejenisnya).

Asuransi jiwa adalah jasa perasuransian yang khusus menanggung resiko kematian, kecelakaan atau sakit, termasuk juga jaminan hari tua/masa depan pihak tertanggung. Nilai pertanggungan ditentukan dan disetujui oleh kedua pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian.

Asuransi kerugian adalah usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas dasar kerugian, kehilangan atau kerusakan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin saja terjadi terhadap harta benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian.

Asuransi sosial adalah usaha perasuransian yang mencakup usaha asuransi jiwa (kerugian) yang dibentuk pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh/segolongan masyarakat untuk tujuan sosial. Pihak asuransi ini akan menerima/menampung sejumlah iuran/sumbangan wajib dari masyarakat yang menggunakan jasa kesehatan, jasa/pelayanan terhadap pemilik kendaraan bermotor dan pelayan hari tua.

Data mengenai output dan NTB dapat diperoleh dari asosiasi atau masing-masing kantor asuransi dan survei khusus. Jika datanya tidak tersedia, dapat digunakan metode alokasi regional Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan berbagai alokator seperti jumlah polis, jumlah premi yang diterima, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.

Output dari kegiatan asuransi merupakan rekapitulasi dari output asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi dan reasuransi kerugian serta broker asuransi. Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan asuransi berupa biaya umum (seperti pembelian alat tulis kantor, BBM, rekening listrik dan sebagainya), biaya pemeliharaan, sewa gedung dan biaya administrasinya.

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan selisih antara output dan biaya antara yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan di peroleh dengan cara sebagai berikut: untuk asuransi jiwa menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah pemegang polis; untuk asuransi sosial menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah peserta; untuk asuransi kerugian menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum.

b. Dana pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat peserta pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun tertunda. Jenis data pensiun dibedakan menjadi dua yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.

Data dapat diperoleh dari laporan Departemen Keuangan (Dirjen Lembaga Keuangan Bukan Bank). Output dan NTB dari kegiatan Dana Pensiun diperoleh dari hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan estimasi output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan cara deflasi/ekstrapolasi dan sebagai deflatornya/ekstrapolatornya adalah IHK umum atau jumlah peserta.

#### c. Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang bersifat monopoli dan dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang, yang tugasnya antara lain membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat. Kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman uang kepada semua golongan masyarakat dengan menerima jaminan barang bergerak. Besarnya pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan yang diserahkan pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

Data dapat diperoleh dari laporan keuangan Perum Pegadaian. Output dan NTB atas dasar harga berlaku dari kegiatan pegadaian diperoleh dari hasil pengolahan laporan keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) Perum Pegadaian. Outputnya terdiri dari sewa modal, bunga deposito dan lain-lain (sewa rumah). NTB diperoleh dengan mengurangkan output dengan biaya antara. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah nasabah.

d. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang bergerak di sektor keuangan dengan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Lembaga kegiatan ini mencakup kegiatan sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Data dapat diperoleh dari Departemen Keuangan. Output dan struktur input atas dasar harga berlaku lembaga pembiayaan diperoleh dari Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah perusahaan.

e. Koperasi

Kegiatan ini hanya meliputi koperasi simpan pinjam. Data mengenai pendapatan koperasi simpan pinjam diperoleh dari Dinas Koperasi Kota Samarinda. Sedangkan rasio biaya antara diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR). Output dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menjumlahkan semua hasil usaha dari kegiatan koperasi simpan pinjam. Sedangkan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh setelah mengeluarkan biaya antara terhadap output. NTB atas dasar harga konstan tahun dasar 1993 dihitung dengan cara deflasi, dengan indeks harga konsumen (IHK) umum sebagai deflatornya.

### 2.8.3 Jasa Penunjang Keuangan

Subsektor ini mencakup kegiatan pedagang valuta asing, pasar modal dan jasa penunjangnya, manajer investasi, penasehat investasi, reksa dana, biro administrasi efek, tempat penitipan harta sejenisnya.

a. Pedagang valuta asing

Pedagang valuta asing adalah suatu badan usaha/perusahaan yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing serta membeli *travel check*, dan perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pengiriman uang dan menagih sendiri keluar negeri.

Data mengenai pedagang valuta asing bersumber dari Bank Indonesia. Output dari pedagang valuta asing merupakan selisih penjualan valuta asing dengan pemberian valuta asing. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian rasio NTB terhadap outputnya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan di peroleh dengan menggunakan metode deflasi.

b. Pasar modal

Pasar modal adalah tempat atau sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli modal/dana jangka panjang. Modal yang diperjualbelikan secara konkrit diwakili oleh bentuk-bentuk efek (surat berharga).

Data pasar modal diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pasar modal. Output dan NTB atas dasar harga ber-laku diperoleh dari laporan tahunan perusahaan (BEJ, BES dan BPI). Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan di peroleh dengan menggunakan metode deflasi.

c. Perantara perdagangan efek/pialang/broker

Perantara perdagangan efek/pialang/broker adalah perusahaan perantara perdagangan efek yang berperan mempertemukan antara penjual dan pembeli efek, menyediakan informasi bagi kepentingan para pemodal dan lain-lain. Yang bertindak sebagai perantara

perdagangan efek yang dapat dilakukan oleh perorangan atau institusi badan hukum.

d. Undewriter (penjamin emisi)

Adalah suatu lembaga yang berfungsi menilai kewajaran harta kekayaan emiten. Penilaian khususnya meliputi tanah, bangunan, mesin-mesin dan sarana pelengkap lainnya. Di samping itu juga meneliti apakah harta kekayaan-kekayaan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan semula serta mempunyai manfaat secara teknis dan ekonomis.

e. Lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan

Lembaga ini adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan kliring dan penyelesaian transaksi di bursa efek, serta penyimpanan efek dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain.

f. Manajer investasi

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabah, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun atau bank berdasarkan izin yang diperoleh dari bank.

g. Penasehat investasi

Penasehat investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya memberi nasehat, membuat analisa, dan membuat laporan mengenai efek tak terkecuali kepada sekurang-kurangnya 15 (lima belas) pihak lain, tetapi tidak termasuk: pinjaman emisi efek, pihak penyelenggara perusahaan yang kegiatannya bukan dalam bidang efek dan setiap profesi yang tidak memerlukan izin usaha sebagai penasehat investasi.

h. Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran deviden, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau laporan tahunan untuk emiten.

i. Reksa dana

Reksa dana adalah emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali atau perdagangan efek.

j. Tempat penitipan harta

Tempat penitipan harta adalah perusahaan yang menyelenggarakan penyimpanan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak. NTB untuk jasa penunjang keuangan ini belum dihitung secara terpisah, dikarenakan belum tersedia datanya. NTB dianggap dicakup di dalam *mark-up* sektor ini.

#### **2.8.4 Sewa Bangunan**

Subsektor ini meliputi usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan, usaha persewaan tanah persil.

##### **a. Sewa bangunan bukan tempat tinggal**

Jenis kegiatan ini mencakup kegiatan usaha persewaan jual beli barang-barang tidak bergerak (bangunan dan tanah), termasuk agen real estate, broker dan marker yang mengurus persewaan, pembelian, penjualan dan penaksiran nilai tanah/bangunan atas dasar harga balas jasa atau kontrak.

Data mengenai perusahaan yang bergerak dalam persewaan bangunan bukan tempat tinggal dapat diperoleh dari asosiasi atau instansi terkait. Rata-rata output per perusahaan dan rasio nilai tambah diperoleh dari survei khusus (SKPR).

Perkiraan output atas dasar harga berlaku dapat menggunakan pendekatan produksi, yaitu banyaknya perusahaan atau tenaga kerja dikalikan dengan rata-rata output per perusahaan atau tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara ekstrapolasi dimana jumlah perusahaan atau tenaga kerja sebagai ekstrapolatornya, atau dengan cara deflasi dimana IHK sebagai deflatornya. NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara output dengan rasio NTB.

b. Sewa bangunan tempat tinggal

Sewa bangunan tempat tinggal mencakup kegiatan atas penggunaan rumah/bangunan sebagai tempat tinggal oleh rumahtangga tanpa memperhatikan apakah rumah itu milik sendiri atau disewa, dikontrak, sewa beli atau rumah dinas. Oleh sebab itu, output sewa rumah adalah besarnya nilai sewa suatu rumah (termasuk biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil), sedangkan biaya perbaikan besar bangunan tempat tinggal yang dilakukan oleh rumah tangga dimasukkan dalam sektor Bangunan.

**Kontrak** adalah jika tempat tinggal tersebut disewa rumahtangga atau salah seorang anggota rumahtangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dengan pemakai, misalnya satu atau dua tahun. Cara pembayaran sewa biasanya

sekaligus dimuka atau diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami, tetapi kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

**Sewa** adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batas waktu tertentu.

**Sewa beli** adalah jika tempat tinggal tersebut pada mulanya berstatus sewa, tetapi setelah jangka waktu tertentu menjadi milik sendiri.

**Rumah dinas** adalah jika tempat tinggal tersebut disediakan oleh instansi pemerintahan atau swasta, baik dengan membayar sewa, sewa beli maupun tanpa membayar sewa.

Data mengenai jumlah penduduk dan rumahtangga atau kepala keluarga setiap tahunnya diperoleh dari BPS Kota Samarinda yang dapat di perkirakan dari hasil Sensus Penduduk, sedangkan data mengenai rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita untuk sewa, kontrak dan perbaikan dapat diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) yang kemudian di-inflate dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) komponen biaya tempat tinggal untuk memperkirakan rata-rata pengeluaran sewa rumah untuk tahun yang

bersangkutan. Data rata-rata tarif sewa rumahtangga dan rasio NTB diperoleh melalui hasil survei sewa rumah atau survei khusus.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal atas dasar harga berlaku diperkirakan berdasarkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk sewa rumah, kontrak rumah serta ongkos pemeliharaan dan perbaikan rumah. Output tersebut dihitung dengan cara mengalikan pengeluaran konsumsi rumahtangga per kapita untuk sewa, kontrak dan perbaikan dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Output atas dasar harga berlaku dapat pula diperkirakan dengan perkalian jumlah rumah tangga dan rata-rata pengeluaran untuk sewa rumah tangga per kepala keluarga. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan dapat diperkirakan dengan metode revaluasi atau deflasi dengan IHK komponen biaya tempat tinggal sebagai deflator.

### **2.8.5 Jasa Perusahaan**

#### **a. Jasa hukum (Advokat/pengacara, notaris )**

Yang dimaksud dengan advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Sedangkan notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh departemen kehakiman untuk

mensyahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akte dan sebagainya.

b. Jasa akuntansi dan pembukuan

Jasa akuntansi dan pembukuan adalah usaha jasa pengurusan tata buku dan pemeriksaan pembukuan termasuk juga jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akuntansi dan pembukuan.

c. Jasa pengolahan dan penyajian data

Jasa pengolahan dan penyajian data adalah usaha jasa pengolahan dan penyajian data yang bersifat umum baik secara elektronik, komputer maupun manual atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk di dalamnya adalah jasa pembuatan program komputer dan sebagainya yang ada hubungannya dengan kegiatan komputer.

d. Jasa bangunan, arsitek dan teknik

Jasa bangunan, arsitek dan teknik adalah usaha jasa konstruksi bangunan, jasa survei geologi, penyelidikan/pencarian komoditi pertambangan dan jasa penyelidikan serta sejenisnya.

e. Jasa periklanan dan riset pemasaran

Jasa periklanan dan riset pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan pelayanan kepada pihak lain dalam bentuk pembuatan dan pemasangan iklan, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, membujuk dan mengingatkan kepada konsumen tentang produk dari suatu perusahaan/usaha serta dalam penyampaian dapat melalui berbagai media massa.

f. Jasa persewaan mesin dan peralatan

Jasa persewaan mesin dan peralatan adalah usaha persewaan mesin dan peralatannya untuk keperluan pertanian, pertambangan dan ladang minyak, industri pengolahan, konstruksi, dan mesin-mesin keperluan kantor.

Output jasa perusahaan diperoleh dari perkalian antara indikator produksi (jumlah perusahaan atau tenaga kerja) dengan indikator harga (rata-rata output per perusahaan atau per tenaga kerja).

Subsektor ini mencakup kegiatan jasa pengacara, jasa angkutan, notaris, jasa arsitektur, jasa pengolahan data, jasa periklanan dan sebagainya.

Perkiraan output dan NTB didasarkan pada jumlah tenaga kerja serta rata-rata output dan rasio biaya antara yang bersumber dari Survei Khusus Pendapatan Regional. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 dihitung dengan cara deflasi menggunakan IHK umum sebagai deflatornya.

## **2.9 SEKTOR JASA –JASA**

### **2.9.1 Pemerintahan Umum**

Perkiraan nilai tambah untuk sub sektor ini adalah merupakan penjumlahan seluruh komponen belanja pegawai baik pegawai Pemerintah Pusat yang diperbantukan di daerah maupun pegawai pemerintah daerah itu sendiri, perkiraan komponen upah belanja pembangunan dan belanja barang ditambah perkiraan penyusutan. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku untuk Pemerintah Pusat dihitung dengan cara estimasi berdasarkan indeks pegawai. Sedangkan perkiraan nilai tambah dari pemerintah daerah dan pertahanan dihitung dengan penjumlahan komponen-komponen yang telah disebutkan di atas. Data mengenai jumlah belanja pegawai, belanja barang, belanja pembangunan untuk pemerintah daerah diperoleh dari kantor-kantor perwakilan seluruh angkatan dan polri yang berada di Kota Samarinda. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi.

### **2.9.2 Jasa Hiburan dan Kebudayaan**

Sub sektor ini mencakup kegiatan perusahaan/lembaga swasta yang bergerak dalam jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan, seperti jasa bioskop, bilyard, jasa video, klub malam, diskotik, jasa studio radio dan lainnya yang dikelola oleh swasta. Output masing-masing kegiatan diperoleh dengan cara mengalikan masing-masing indikator produksi dengan rata-rata output masing-masing indikator. Sedangkan perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan rasio nilai tambah terhadap output. Data mengenai jumlah masing-masing indikator diperoleh dengan melakukan pendekatan langsung ke perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha seperti yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya untuk memperoleh informasi mengenai rata-rata output per indikator produksi dan rasio biaya antara per indikator didapat melalui Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi.

### **2.9.3 Jasa Sosial Kemasyarakatan**

Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa kemasyarakatan lainnya, seperti panti asuhan, rumah ibadah dan sebagainya terbatas yang dikelola oleh lembaga swasta lainnya.

a. Jasa pendidikan

Yang termasuk kedalam jasa pendidikan swasta adalah segala macam lembaga pendidikan swasta mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, termasuk kursus menjahit, montir, mengemudi dan lain-lainnya yang sejenis. Perkiraan output pada kegiatan ini adalah dengan cara mengalikan jumlah murid/mahasiswa dengan rata-rata output per murid/mahasiswa. Data mengenai jumlah murid diperoleh dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Samarinda dan data mengenai jumlah mahasiswa diperoleh dari masing-masing perguruan tinggi yang ada di Kota Samarinda. Sedangkan rata-rata output per unit produksi di dapat dari hasil SKPR Kota Samarinda. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara mengeluarkan biaya antara dan outputnya. Sedangkan perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi.

b. Jasa kesehatan

Mencakup jasa rumah sakit, dokter praktek, dukun dan bidan bayi serta jasa kesehatan lainnya yang dikelola oleh swasta. Perkiraan output masing-masing kegiatan didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah indikator masing-masing kegiatan dengan rata-rata output per indikator. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan

pada rasio nilai tambah terhadap output. Data mengenai jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter praktek dan jumlah dukun/bidan bayi didapat dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Selanjutnya untuk mendapatkan informasi mengenai rata-rata output per indikator dan rasio biaya antara per indikator diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional Kota Samarinda. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasinya.

c. Jasa sosial dan kemasyarakatan lainnya

Mencakup kegiatan panti asuhan dan rumah ibadah. Perkiraan output atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara mengalikan rata-rata output per anak asuh dan rata-rata output per rumah ibadah dengan jumlah anak asuh dan jumlah rumah ibadah. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan rasio nilai tambah terhadap output. Data mengenai jumlah anak asuh diperoleh dari Dinas Sosial Kota Samarinda. Sedangkan data mengenai jumlah rumah ibadah didapat dari kantor Departemen Agama Kota Samarinda. Sementara itu data mengenai rata-rata output per unit produksi dan rasio biaya antara per unit produksi diperoleh melalui Survei Khusus Pendapatan Regional Kota Samarinda. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi.

#### **2.9.4 Jasa Perorangan dan Rumah Tangga**

Sub sektor ini meliputi segala jenis kegiatan jasa yang melayani perorangan dan rumah tangga, seperti reparasi dan pemeliharaan alat-alat rumah tangga, binatu, tukang cukur, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Namun berhubung adanya kesulitan dalam memperoleh data mengenai kegiatan-kegiatan tersebut, maka untuk menghitung output sub sektor ini dihitung dengan menggunakan pendekatan tenaga kerja, yaitu merupakan hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Data mengenai jumlah tenaga kerja diperoleh dari SUSEDA. Sedangkan data mengenai rata-rata output per tenaga kerja dan rasio biaya antara diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda. Perkiraan nilai tambah atas dasar harga berlaku didapat setelah mengeluarkan komponen biaya antara terhadap output. Selanjutnya untuk memperkirakan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi.

## **BAB III**

# **TINJAUAN EKONOMI KOTA SAMARINDA TAHUN 2006-2009**

### **3.1 KONDISI UMUM EKONOMI**

Pada tahun 2009, Kota Samarinda mengalami perlambatan pembangunan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,47 persen. Apabila diamati secara rinci, perlambatan pertumbuhan terjadi di sektor-sektor ekonomi dominan, seperti sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran serta sektor Jasa-Jasa, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi secara umum di Kota Samarinda.

Namun demikian, masih terdapat sektor-sektor yang mengalami percepatan ekonomi pada tahun 2009. Sektor-sektor tersebut adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Bangunan dan Sektor Angkutan. Sektor-sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan dan diupayakan sehingga dapat berperan sebagai sektor pendorong dan penggerak ekonomi di masa yang akan datang.

Pertumbuhan pembangunan yang dialami Kota Samarinda juga tidak terlepas dari peranan Pemerintah dalam mengelola anggaran publik.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2001, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, termasuk kegiatan pembangunan dibidang ekonomi. Hal tersebut tercermin pada peningkatan total nilai APBD Kota Samarinda sejak tahun 2001 yang mengindikasikan kemandirian daerah dalam membangun ekonominya. Percepatan yang telah tercipta tersebut selanjutnya diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Sehingga selain menciptakan pertumbuhan, yang lebih penting adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran secara tepat guna menjamin terciptanya distribusi hasil-hasil pembangunan secara adil, serta memanfaatkan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PDRB, yang dilengkapi dengan beberapa data turunan, merupakan suatu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi daerah. PDRB adalah indikator yang menunjukkan kemampuan semua faktor produksi di dalam suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa atau menciptakan pendapatan dalam periode atau tahun tertentu. Beberapa indikator yang dapat diturunkan dari nilai PDRB adalah perkembangan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, gabungan

inflasi produsen dan konsumen (indeks implisit), perkembangan PDRB per kapita dan pendapatan perkapita, serta produktivitas tenaga kerja secara rinci dan lain sebagainya. Secara bersama-sama keseluruhan data tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai makro ekonomi Kota Samarinda.

Sebagai data ekonomi yang disajikan secara tahunan, PDRB dapat menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Samarinda. Melalui data tersebut, secara historis dapat terlihat perubahan jumlah nilai tambah (*value added*) dari produksi barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Lebih lanjut, data tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan kajian ekonomi regional, karena berdasarkan data tersebut dapat diperoleh informasi mengenai perubahan ekonomi dari tahun ke tahun. Hasil kajian tersebut selanjutnya dapat berguna sebagai dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan di semua sektor ekonomi suatu wilayah sesuai dengan perkembangan waktu.

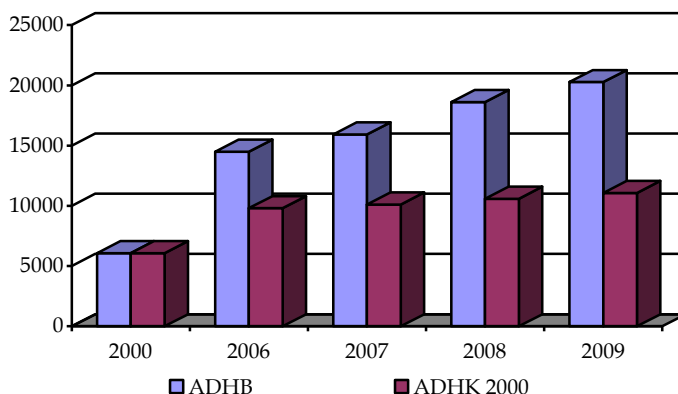
### **3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI**

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, perekonomian Kota Samarinda berkembang cukup pesat. Ini ditunjukkan oleh besaran nilai PDRB atas dasar harga yang terus meningkat sejak tahun 2006 hingga 2009. Selama periode tersebut, Kota Samarinda mengalami

pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 4,13 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang konsisten terjadi selama periode yang sama di hampir seluruh sektor ekonomi di Kota Samarinda.

Terjadi penurunan pada besaran pertumbuhan atau perlambatan ekonomi selama tahun 2006-2009. Pada tahun 2006, besaran pertumbuhan adalah 5,50 persen kemudian menurun hingga tahun 2007 menjadi sebesar 3,11 persen. Pada tahun 2008, terjadi percepatan ekonomi dimana besaran pertumbuhan meningkat menjadi sebesar 4,82 persen. Percepatan tersebut sebagian bersumber dari aktivitas Pekan Olahraga Nasional (PON) di tahun 2008. Kemudian, pada tahun 2009 perekonomian Kota Samarinda mengalami perlambatan ekonomi, dimana terjadi penurunan besaran pertumbuhan ekonomi menjadi 4,47 persen, yang disebabkan terutama oleh perlambatan yang terjadi di sektor dominan Kota Samarinda, yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Perkembangan ekonomi Kota Samarinda selama tahun 2000 dan 2006-2009 dapat dilihat pada Grafik 3.1.

**Grafik 3.1**  
**PDRB Kota Samarinda Tahun 2000, 2006-2009**  
**( Milyar Rupiah )**



Berdasarkan Grafik 3.1 terlihat bahwa selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, terdapat kecenderungan peningkatan pada nilai PDRB baik itu harga berlaku maupun harga konstan. Selama periode 2000-2006, rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Samarinda sebesar 8,42 persen per tahun. Bila dibandingkan dengan periode berikutnya, yaitu tahun 2006-2009, perekonomian wilayah mengalami perlambatan (rata-rata pertumbuhan sebesar 4,13 persen per tahun).

Perlambatan yang terjadi di tahun 2006, dimana besaran pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dari 8,05 persen pada tahun 2005 menjadi 5,50 persen pada tahun 2006 (Tabel 3.1), terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM pada bulan

Oktober 2005. Dampak dari kenaikan harga tersebut dirasakan pada tahun 2006. Peningkatan harga BBM berdampak pada peningkatan biaya produksi, dimana harga barang-barang input menjadi lebih mahal. Akibatnya, hal yang sering dilakukan oleh para produsen dengan mengurangi jumlah input yang digunakan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah produksi yang dihasilkan.

Selain kenaikan harga, faktor lain yang menyebabkan terjadinya perlambatan pada tahun 2006 adalah faktor kondisi alam yang tidak menentu. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang sebagian besar didatangkan dari luar Pulau Kalimantan. Akibat suplai barang menurun, sementara hal tersebut tidak diikuti oleh penurunan pada sisi permintaan, akibatnya terjadi kenaikan harga. Hal ini berakibat pada penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada perlambatan ekonomi wilayah Kota Samarinda.

**Tabel 3.1 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB  
Tahun 2000, 2006 – 2009**

Tahun	PDRB (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan per tahun (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	6.077.497	6.077.497	-
2006	14.500.247	9.803.725	5,50
2007 <sup>r)</sup>	15.930.651	10.108.378	3,11
2008 <sup>r)</sup>	18.616.882	10.595.535	4,82
2009 <sup>*)</sup>	20.271.686	11.068.640	4,47
2000-2009	-	-	<b>6,97</b>

Keterangan : <sup>r)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

Pertumbuhan ekonomi 4,47 persen berasal dari peningkatan aktivitas di hampir seluruh sub sektor ekonomi di Kota Samarinda, kecuali sub sektor kehutanan dan pertambangan migas. Akan tetapi, besaran peningkatan yang terjadi di sektor-sektor dengan kontribusi besar seperti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor jasa relatif lebih rendah, masing-masing sebesar 4,07 persen dan 6,17 persen. Peningkatan di sektor Industri Pengolahan tidak signifikan mempengaruhi perekonomian kota Samarinda secara total. Sehingga secara umum, pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak terlalu besar.

Pada tahun 2006, besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 14,50 trilyun rupiah atau lebih dari dua kali lipat PDRB di tahun 2000, sebesar 6,08 trilyun rupiah. Kenaikan pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku berlanjut hingga tahun 2009 nilainya mencapai 20,27 trilyun rupiah atau lebih dari tiga kali lipat dibandingkan nilai PDRB di tahun 2000. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Secara riil, pada tahun 2009 terdapat kenaikan sekitar 473,1 milyar rupiah, sehingga nilai nominal atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai 11,07 trilyun rupiah. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan terjadi di hampir seluruh sub sektor ekonomi. Kenaikan tersebut menciptakan pertumbuhan sebesar 4,47 persen. Dibandingkan tahun 2008, besaran kenaikan tersebut hampir sama, bahkan lebih kecil dibandingkan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2008, sebesar 487,2 milyar rupiah. Hal tersebut menunjukkan perlambatan yang terjadi pada perekonomian Kota Samarinda di tahun 2009.

Pada tahun 2009, sektor dominan yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami perlambatan. Sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan sektor lain, namun pertumbuhannya lebih lambat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, sektor ini sangat signifikan dalam menciptakan

pertumbuhan ekonomi, bahkan percepatan ekonomi. Pelaksanaan PON Juli 2008 berpengaruh sangat signifikan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan selesainya pelaksanaan PON, walaupun terjadi pertumbuhan yang positif, aktivitas sektor tersebut menjadi bergerak lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya.

Sektor lain yang juga mengalami perlambatan adalah sektor Keuangan, Persewaan, maupun Jasa Perusahaan. Walaupun sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2009, yaitu 5,16 persen, namun besaran pertumbuhan tersebut lebih lambat jika dibandingkan tahun 2008. Lebih lanjut, Sektor Jasa-Jasa juga mengalami penurunan besaran persentase pertumbuhan atau perlambatan, yaitu dari 6,76 persen di tahun 2008 menjadi 6,17 persen di tahun 2009.

Pergerakan ekonomi yang cukup signifikan di wilayah Kota Samarinda adalah kegiatan pembangunan properti yang cukup meningkat. Ini ditandai dengan munculnya perumahan baru, serta ruko dan mall yang tersebar di wilayah Kota Samarinda. Lebih lanjut, geliat sektor tersebut cukup signifikan, hal ini ditandai dengan percepatan pertumbuhan di sektor bangunan, yaitu peningkatan besaran pertumbuhan dari 4,14 persen di tahun 2008 menjadi 4,94 persen di tahun 2009.

Dua sektor ekonomi yang mengalami percepatan serta pertumbuhan terbesar adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar 7,49 dan 7,07 persen. Sektor Pertanian juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 4,59 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi di Sektor ini, bersumber dari sub sektor Peternakan yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yaitu 7,14 persen. Sementara sub sektor yang lain mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, bahkan penurunan di sub sektor Kehutanan (minus 3,61 persen).

Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih serta sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan walaupun dengan besaran yang kecil, yaitu 1,80 persen. Walaupun memiliki pertumbuhan yang relatif kecil dibanding sektor lainnya, namun karena peranan sektor tersebut signifikan dalam kegiatan ekonomi Kota Samarinda, maka pertumbuhan yang terjadi di sektor tersebut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda secara keseluruhan. Akibat kenaikan yang relatif kecil yang terjadi di sektor tersebut, maka walaupun pertumbuhan yang terjadi di sektor lain cukup besar, yaitu berkisar 6 hingga 8 persen, pertumbuhan ekonomi secara total menjadi hanya 4,47 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan selama periode tersebut merupakan salah satu dampak positif dari otonomi daerah, melalui

peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut juga tidak terlepas dari peran swasta dalam melakukan aktivitas ekonominya di Kota Samarinda. Sehingga kedepan, perlu sinergi serta kerjasama dari kedua pihak dalam menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda yang dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja serta kesejahteraan masyarakat.

### **3.3 STRUKTUR EKONOMI**

Selama periode tahun 2000 hingga 2009, terjadi perubahan dalam struktur perekonomian Kota Samarinda. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya dinamika perubahan struktur tersebut adalah perkembangan teknologi, adanya perbedaan insentif yang diterima atas investasi yang dilakukan, serta perkembangan dan ketersediaan sumber daya atau faktor produksi suatu sektor usaha.

Selain itu, perubahan struktur ekonomi dapat juga disebabkan oleh adanya perbedaan laju pertumbuhan antar sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi akan memiliki kontribusi yang semakin besar, sebaliknya sektor dengan pertumbuhan yang kecil akan mengalami penurunan kontribusi terhadap total nilai tambah wilayah. Perubahan tersebut berimplikasi pada perubahan distribusi pendapatan sektoral dari para pelaku

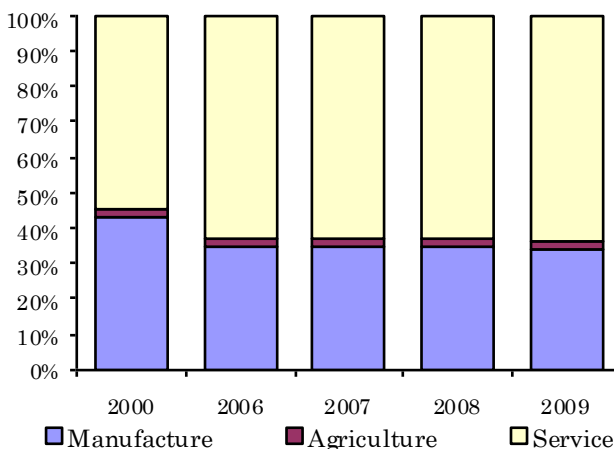
ekonomi. Akibatnya adalah sektor dengan kontribusi yang semakin menurun pada beberapa tahun terakhir akan menjadi kurang menarik dibandingkan sektor ekonomi lain yang pertumbuhan dan kontribusinya semakin besar. Akibatnya adalah akan terjadi pergeseran faktor produksi ke sektor-sektor yang semakin berkembang dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi.

Peranan sektor dan sub sektor ekonomi sangat mempengaruhi karakteristik ekonomi suatu daerah. Hal tersebut terkait dengan potensi masing-masing sektor atau sub sektor dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan/pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa sektor atau sub sektor mungkin memiliki potensi pertumbuhan tinggi, sedangkan yang lain memiliki potensi pertumbuhan lambat.

Secara umum, kegiatan perekonomian dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu Pertanian (*agriculture*), Produksi (*manufacturing*) dan Jasa (*services*). Grafik 3.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2000-2009 telah terjadi pergeseran kontribusi dalam pembentukan nilai tambah (*added value*) barang dan jasa. Seperti pada umumnya wilayah perkotaan, sektor Jasa sangat mendominasi perekonomian di Kota Samarinda, yang kemudian diikuti oleh sektor Produksi.

Sejak tahun 2000, terjadi pergeseran pada peranan masing-masing sektor dalam perekonomian Kota Samarinda (Tabel 3.2.). Peranan sektor Jasa (*services*) terhadap pembentukan total PDRB terus meningkat. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 54,62 persen pada tahun 2000, kemudian terus meningkat hingga menjadi 63,70 persen di tahun 2009. Ini berdampak pada penurunan peranan di sektor Produksi (*manufacture*) yaitu dari 43,00 persen pada tahun 2000, menjadi hanya 34,15 persen pada tahun 2009. Sedangkan kontribusi sektor Pertanian (*agriculture*) cenderung tetap dan sangat kecil dibanding kedua sektor yang lain, yaitu dari 2,38 persen pada tahun 2000 menjadi 2,15 persen pada tahun 2009.

**Grafik 3.2**  
**Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2000, 2006-2009**  
**(persen)**



Berdasarkan klasifikasi 9 (sembilan) sektor ekonomi atau lapangan usaha, pada tahun 2009 sektor yang mempunyai sumbangan tertinggi adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi sebesar 28,45 persen. Peranan sektor tersebut selama sembilan tahun terakhir terus meningkat, dari sekitar 21,59 persen pada tahun 2000 menjadi 28,45 persen pada tahun 2009. Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan. Pertumbuhan sektor tersebut belum mampu tumbuh di atas lima persen sepanjang kurun waktu 2000-2009, sehingga kontribusi relatif menurun dari 31,90 persen pada tahun 2000 menjadi menjadi 20,77 persen pada tahun 2009. Kondisi tersebut disebabkan oleh sulitnya memperoleh bahan baku, terutama untuk sektor industri kayu lapis (*plywood*) yang mengalami kesulitan pasokan hingga membuat beberapa perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja di awal tahun 2008. Bahkan di akhir tahun 2008, terdapat 2 (dua) industri kayu lapis yang terpaksa menghentikan kegiatan produksinya. Pada kasus industri plywood ini, faktor ketersediaan input, yaitu kayu, merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian.

**Tabel 3.2 Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2000, 2006-2009 (persen)**

Lapangan Usaha	2000	2006	2007 <sup>r)</sup>	2008 <sup>r)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Sektor A</b>	<b>2,38</b>	<b>2,20</b>	<b>2,26</b>	<b>2,20</b>	<b>2,15</b>
1. Pertanian	2,38	2,20	2,26	2,19	2,15
<b>Sektor M</b>	<b>43,00</b>	<b>34,73</b>	<b>34,37</b>	<b>34,45</b>	<b>34,15</b>
2. Pertambangan & Penggalian	5,39	5,86	6,03	6,47	6,57
3. Industri Pengolahan	31,90	21,85	21,50	21,19	20,77
4. Listrik dan Air Minum	1,55	1,32	1,25	1,26	1,29
5. Kontruksi/Bangunan	4,16	5,70	5,59	5,53	5,52
<b>Sektor S</b>	<b>54,61</b>	<b>63,07</b>	<b>63,37</b>	<b>63,35</b>	<b>63,70</b>
6. Perdagangan, Restoran & Hotel	21,59	27,31	28,09	28,34	28,45
7. Angkutan dan Komunikasi	11,02	11,43	11,01	10,28	10,52
8. Keuangan	12,85	12,28	12,45	13,01	12,75
9. Jasa-Jasa	9,16	12,06	11,82	11,72	11,98
<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan : <sup>r)</sup> Angka Revisi

<sup>\*)</sup> Angka Sementara

Selain kedua sektor diatas, lapangan usaha atau sektor ekonomi lain yang juga cukup signifikan (memiliki kontribusi di atas 10 persen) dalam perekonomian Kota Samarinda adalah sektor Keuangan (12,75 persen), sektor Jasa-jasa (11,98 persen), serta sektor Angkutan dan Komunikasi (10,52 persen). Sedangkan kontribusi yang relatif kecil

diberikan oleh sektor Listrik dan Air Minum yang berkisar antara 1,29 persen dari total nilai tambah bruto Kota Samarinda, dan sektor Pertanian sebesar 2,15 persen pada tahun 2009.

### **3.4 PDRB DAN PENDAPATAN PER KAPITA**

Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya memperhatikan kenaikan PDRB secara total, tetapi perlu juga dilihat perkembangan PDRB per kapita, khususnya pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Tabel 3.3 menyajikan perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 untuk periode 2000-2009.

Perlu dipahami bahwa angka PDRB per kapita ini masih bersifat kotor (bruto). Karena angka tersebut ini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk antar daerah. Secara teknis, dibutuhkan pendataan khusus atau survei khusus untuk mengetahui besarnya transfer dari pendapatan penduduk dan perusahaan yang ada di Samarinda. Akan tetapi hingga saat hal tersebut belum pernah dilakukan. Namun demikian, PDRB per kapita masih banyak digunakan di berbagai daerah dan dianggap cukup memadai sebagai salah satu indikator kemakmuran atau potensi ekonomi daerah.

**Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2000, 2006-2009**

Tahun	PDRB per Kapita			Pertumbuhan /tahun (%)
	Harga Berlaku (Rupiah)	US\$	Harga Konstan 2000 (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	11.585.917	1.208	11.585.917	-
2006	24.683.136	2.716	16.669.174	3,33
2007 <sup>r)</sup>	26.827.092	2.760	17.022.429	2,12
2008 <sup>r)</sup>	30.919.043	2.976	17.597.137	3,38
2009 <sup>*)</sup>	33.359.421	3.549	18.214.737	3,51
<b>2006-2009</b>	-	-	-	<b>3,00</b>

Keterangan : <sup>r)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

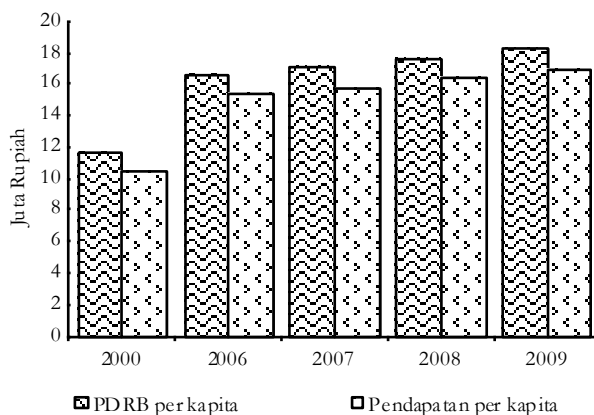
Perkembangan PDRB per kapita, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, selama periode 2006-2009 menunjukkan adanya peningkatan, walaupun tidak terlalu besar. Selama periode 2005 hingga 2007, PDRB per Kapita melambat dari semula meningkat sebesar 6,95 persen di tahun 2005 hingga meningkat hanya sekitar 2 persen di tahun 2007. Pada tahun 2008 terjadi percepatan walaupun tidak terlalu besar yaitu sebesar 3,38

persen, yang terus berlangsung hingga tahun 2009 yaitu sebesar 3,51 persen. Sehingga rata-rata pertumbuhan per tahun selama periode 2006-2009 menjadi sebesar 3,00 persen.

Apabila dicermati, terdapat peningkatan yang konsisten pada nilai PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku. Dimana selama 9 (sembilan) tahun terakhir, nilai PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 11,59 juta rupiah tahun 2000 menjadi 33,36 juta rupiah tahun 2009, atau apabila dihitung kenaikan rata-rata per tahun sekitar 12,47 persen. Hal yang sama juga terjadi pada nilai PDRB per Kapita atas dasar konstan, dimana pada periode yang sama juga terus mengalami peningkatan hingga mencapai hampir 17 juta rupiah, atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,16 persen per tahun.

Gambaran yang sama diperoleh pada besaran Pendapatan per Kapita (Grafik 3.3). Selama 2006 hingga 2009, terjadi peningkatan yang kontinyu pada nilai Pendapatan per Kapita yaitu sebesar 3,10 persen per tahun. Hal ini menggambarkan perkembangan pendapatan masyarakat dimana terdapat kecenderungan peningkatan pendapatan riil. Kondisi ini mengimplikasikan adanya peningkatan kemampuan pada daya beli masyarakat di masa yang akan datang. Untuk itu, perlu diteliti faktor-faktor penyebab serta bagaimana cara yang tepat guna semakin meningkatkan daya beli masyarakat lebih lanjut.

**Grafik 3.3**  
**PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita**  
**ADHK Tahun 2000, 2006-2009**



Walaupun terdapat kecenderungan fluktuasi pada nilai tukar rupiah, akan tetapi hal tersebut tidak berdampak secara negatif terhadap besaran nilai PDRB per Kapita. Ini ditunjukkan oleh kecenderungan nilai PDRB per Kapita Kota Samarinda (dalam dollar Amerika) yang terus meningkat selama tahun 2000-2008. Pada tahun 2008, PDRB per Kapita mencapai US\$ 2.961 atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2000 yang hanya sebesar US\$ 1.208.

### **3.5 INDEKS IMPLISIT DAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)**

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi suatu wilayah (*region*) dengan melihat perubahan harga barang dan jasa secara umum. Selain itu, inflasi juga dapat digunakan untuk melihat kestabilan nilai tukar uang terhadap barang dan jasa.

Perkembangan inflasi dapat dilihat dari dua indikator statistik. Pertama, Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diterbitkan secara bulanan, sedangkan yang kedua adalah Indeks Implisit PDRB (dengan melihat harga berlaku dan harga konstan PDRB di tahun yang bersangkutan) yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Kota Samarinda. Indeks implisit secara umum menggambarkan “tingkat harga” produsen, sedangkan IHK menggambarkan tingkat harga yang harus dibayar konsumen.

Pada tahun 2009, IHK gabungan atau umum sebesar 121,60 (2007=100). Dengan angka indeks tersebut, maka IHK Kota Samarinda berada di atas angka IHK Nasional (gabungan dari 66 kabupaten/kota) yakni sebesar 117,03. Nilai tersebut merupakan akibat kenaikan yang terjadi selama kurun waktu satu tahun sebesar 4,06 persen. Apabila dicermati, kenaikan IHK di tahun 2009 tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan di seluruh kelompok komoditi, kecuali kelompok

transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi. Kelompok Bahan Makanan memiliki indeks harga tertinggi yaitu 135,87, sedangkan indeks kelompok Makanan Jadi, Rokok dan Tembakau adalah 128,11. Indeks kelompok Perumahan dan Sandang masing-masing adalah 123,55 dan 125,44. Sedangkan indeks komoditi Kesehatan, komoditi Pendidikan dan komoditi Transpor masing-masing adalah sebesar 120,67, 113,07 dan 99,56 (Tabel 3.4).

Kenaikan yang terjadi pada IHK disebut sebagai inflasi. Inflasi dapat berdampak secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila inflasi suatu daerah atau negara tidak dapat dikendalikan, maka yang menerima dampak langsung dari kondisi tersebut adalah masyarakat yang menerima penghasilan tetap dan masyarakat penerima penghasilan rendah. Untuk itu laju inflasi perlu terus diamati, sehingga perubahannya dapat terus diantisipasi atau dikendalikan.

Secara umum, Kota Samarinda masih memiliki suasana ekonomi yang baik dan kondusif, terutama dalam hal inflasi. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi dan peran para pelaku perdagangan yang tidak melakukan spekulasi penimbunan barang, serta kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Kondisi tersebut perlu terus dijaga dan diantisipasi oleh Pemerintah Kota Samarinda serta aparat terkait agar keberadaan stok, khususnya kebutuhan pokok

selalu terjaga. Pada tahun 2009, harga komoditi di Kota Samarinda mengalami inflasi yang moderat, yaitu sebesar 4,06 persen.

**Tabel 3.4 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2006-2007 (Th 2002=100) dan Tahun 2008-2009 (Th 2007=100)**

<b>Kelompok Komoditi</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bahan Makanan	144,35	164,50	128,22	135,87
2. Makanan Jadi, Minuman Rokok dan Tembakau	160,51	175,18	119,09	128,11
3. Perumahan	144,38	152,31	118,04	123,55
4. Sandang	134,43	154,30	118,85	125,44
5. Kesehatan	124,54	137,18	113,16	120,67
6. Pendidikan & Olah Raga	148,80	172,63	111,56	113,07
7. Transportasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	146,82	148,84	102,63	99,56
<b>Gabungan/Umum Kota Samarinda</b>	<b>146,22</b>	<b>159,65</b>	<b>116,86</b>	<b>121,60</b>
<b>Gabungan Kalimantan Timur</b>	<b>148,28</b>	<b>160,58</b>	<b>116,63</b>	<b>121,65</b>
<b>Gabungan Nasional</b>	<b>145,89</b>	<b>147,41</b>	<b>102,52</b>	<b>117,03</b>

Catatan: Untuk Kaltim, Tahun 2006-2007 merupakan gabungan 2 Kota, sedangkan sejak Tahun 2008 merupakan gabungan 3 Kota.

Untuk Nasional, Tahun 2006-2007 merupakan gabungan 45 Kota, sedangkan sejak Tahun 2008 merupakan gabungan 66 Kota.

Sumber : BPS Kota Samarinda

Perkembangan indeks implisit PDRB tahun 2006-2009 disajikan pada Tabel 3.5. Indeks implisit sangat identik dengan indeks harga produsen makro di wilayah Kota Samarinda.

**Tabel 3.5 Perkembangan Indeks Harga Produsen (Implisit PDRB) Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2009 (Tahun 2000 = 100)**

Lapangan Usaha	2006	2007 <sup>r)</sup>	2008 <sup>r)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	145,21	164,18	174,05	178,25
2. Pertambangan dan Penggalan	151,24	163,75	204,31	211,00
3. Industri Pengolahan	137,20	146,44	170,32	179,26
4. Listrik, Air Minum	155,60	155,56	176,95	193,03
5. Kontruksi/Bangunan	143,90	150,61	167,25	173,12
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	155,03	167,19	181,78	190,94
7. Angkutan & Komunikasi	146,59	152,54	159,72	165,54
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	158,97	168,53	189,04	191,84
9. Jasa-Jasa	145,68	151,74	164,74	172,68
<b>Gabungan/Umum</b>	<b>148,08</b>	<b>157,60</b>	<b>175,70</b>	<b>183,15</b>

Keterangan : <sup>r)</sup> Angka Revisi

<sup>\*)</sup> Angka Sementara

Sumber : BPS Kota Samarinda

Perkembangan indeks implisit menunjukkan perubahan harga barang dan jasa pada tingkat produsen dibandingkan terhadap tahun dasar. Dari Tabel 3.5 diperoleh gambaran peningkatan indeks harga gabungan semua sektor ekonomi dari 175,70 di tahun 2008 menjadi 183,15 pada tahun 2009. Berarti selama periode 2008-2009 telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen untuk wilayah Samarinda rata-rata sebesar 4,23 persen. Sedangkan untuk periode yang sama kenaikan harga konsumen adalah sekitar 4,06 persen.

Berdasarkan klasifikasi 9 (sembilan) lapangan usaha, pada tahun 2009 masing-masing sektor memberi sumbangan yang cukup tinggi bagi pembentukan indeks implisit. Sektor-sektor dengan indeks implisit yang tinggi adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Sektor Listrik dan Air Minum masing-masing sebesar 211,00, 190,94, 191,84 dan 193,03. Sedangkan sektor-sektor lainnya memiliki indeks sekitar 165 hingga 179 adalah Sektor Pertanian (178,25), Sektor Industri Pengolahan (179,26) dan Sektor Angkutan dan Komunikasi (165,54).

Perubahan pada kedua angka indeks tersebut memberikan informasi mengenai laju inflasi yang terjadi di wilayah Kota Samarinda, baik itu inflasi atas dasar harga konsumen maupun harga produsen

(berdasarkan perubahan indeks implisit PDRB). Perlu diketahui bahwa komoditi/sector yang mencatat angka indeks tinggi tidak selalu mencerminkan angka inflasi yang tinggi pula.

Laju inflasi berdasarkan harga konsumen di Kota Samarinda pada tahun 2009 sebesar 4,06 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 12,69 persen. Inflasi yang cukup moderat pada tahun 2009 ini disebabkan oleh kegiatan distribusi barang yang cukup baik, sehingga menjamin ketersediaan barang dari sisi penawaran. Terutama barang kebutuhan pokok seperti makanan yang sebagian besar merupakan barang impor dari luar pulau Kalimantan, maka kondisi distribusi barang, selain faktor inflasi dari luar daerah, menjadi faktor penentu yang cukup signifikan bagi terjadinya inflasi di Kota Samarinda. Selain itu, kondisi inflasi yang cukup baik juga merupakan indikasi cukup baiknya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga hal tersebut berdampak positif bagi masyarakat baik itu dari aspek ekspektasi inflasi maupun sisi daya beli masyarakat.

Inflasi memberikan dampak yang cukup luas terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan, terutama terkait penyediaan anggaran dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu angka inflasi sangat diperlukan dalam setiap penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan agar hasil yang diperoleh dapat lebih realistis dan

tajam. Inflasi sangat dipengaruhi oleh kondisi penawaran dan permintaan barang/jasa dalam suatu wilayah. Beberapa kondisi yang memungkinkan terjadinya inflasi adalah: pertama, faktor jumlah persediaan barang/jasa tetap, sedangkan permintaan naik; kedua, jumlah persediaan barang/jasa berkurang tetapi pada saat yang sama jumlah permintaan naik; ketiga, jumlah barang/jasa naik karena adanya kebijakan di bidang keuangan. Perkembangan inflasi Kota Samarinda disajikan pada Tabel 3.6.

Dengan membandingkan perkembangan inflasi dan laju implisit, terlihat bahwa perubahan harga produsen dan konsumen relatif sejalan. Ini ditunjukkan oleh pola gerakan perubahan kedua jenis harga tersebut yang sejalan yang mengindikasikan keterkaitan yang cukup tinggi antara kedua indeks tersebut (Grafik 3.4).

**Tabel 3.6 Perkembangan Laju Inflasi/Deflasi Kota Samarinda Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2005-2009 (Persen)**

Kelompok Komoditi	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bahan Makanan	16,73	8,05	13,96	20,38	5,97
2. Makanan jadi, minuman, Rokok dan tembakau	20,06	6,11	9,14	12,94	7,57
3. Perumahan	12,21	8,65	5,49	15,91	4,67
4. Sandang	6,82	10,14	14,78	7,85	5,54
5. Kesehatan	1,81	4,07	10,15	7,64	6,64
6. Pendidikan dan Olah Raga	2,64	5,02	16,01	8,50	1,35
7. Transpor dan Komunikasi	33,51	1,30	1,38	3,53	-2,99
<b>Gabungan Samarinda</b>	<b>16,64</b>	<b>6,50</b>	<b>9,18</b>	<b>12,69</b>	<b>4,06</b>
<b>Kaltim</b>	<b>16,94</b>	<b>6,04</b>	<b>8,30</b>	<b>13,06</b>	<b>4,31</b>
<b>Nasional</b>	<b>17,11</b>	<b>6,60</b>	<b>1,05</b>	<b>11,06</b>	<b>2,78</b>

Catatan: Untuk Kaltim: Tahun 2004-2007 merupakan gabungan 2 Kota, sedangkan Tahun 2008-2009 merupakan gabungan 3 Kota.

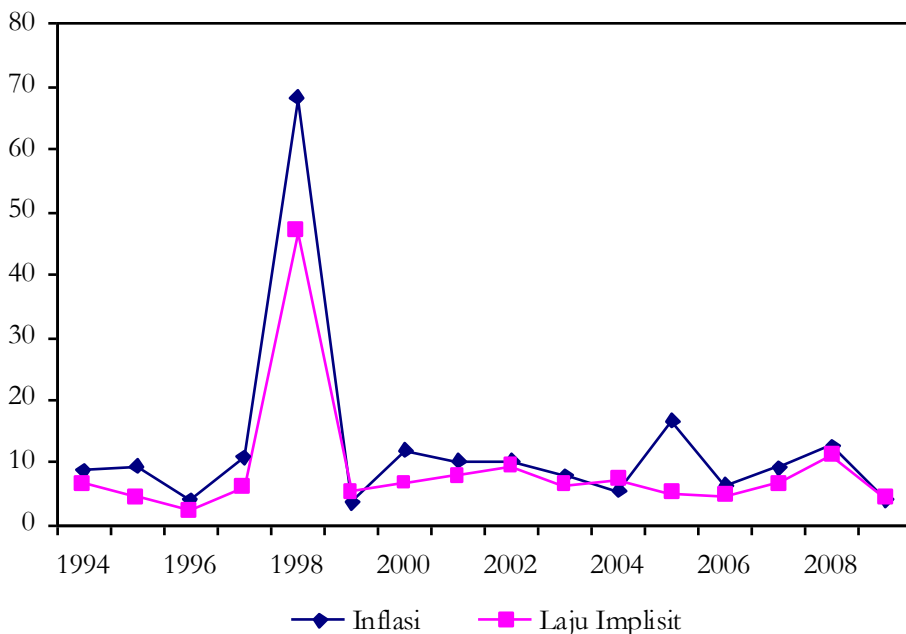
Untuk Nasional: Tahun 2004-2007 merupakan gabungan 45 Kota, sedangkan Tahun 2008-2009 merupakan gabungan 66 Kota.

Sumber : BPS Kota Samarinda

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa secara umum perekonomian Samarinda relatif stabil selama 16 tahun. Perubahan dramatis terjadi di tahun 1998 pada saat krisis ekonomi berlangsung. Ini menunjukkan bahwa kondisi Nasional sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah. Keterkaitan yang sama ditunjukkan melalui inflasi pada tahun 2008, dimana pada saat krisis finansial global terjadi yang

berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, mengakibatkan laju inflasi mencapai dua digit atau 12,96 persen.

**Grafik 3.4.**  
**Perkembangan Laju Inflasi dan Implisit PDRB**  
**Tahun 1994-2009**



### **3.6 PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SEKTORAL**

Produktivitas tenaga kerja diperoleh dengan menggunakan pendekatan penghitungan rasio antara nilai tambah dengan jumlah tenaga kerja. Indikator tersebut menunjukkan besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Semakin tinggi nilai produktivitas, maka tenaga kerja dinilai semakin produktif. Peningkatan pada produktivitas tenaga kerja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh dapat lebih banyak.

Terdapat pergeseran struktur ekonomi wilayah Kota Samarinda dari tahun ke tahun. Perekonomian Kota Samarinda terus berkembang dari ekonomi agraris tradisional menjadi struktur ekonomi yang lebih maju, yaitu ekonomi yang didukung oleh sektor jasa-jasa dan industri yang makin kuat. Selain itu, sektor pertanian yang juga semakin tangguh, sehingga mempunyai daya serap tenaga kerja akan semakin meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya mampu mengurangi angka pengangguran. Situasi penguatan pemulihan ekonomi Kota Samarinda yang semakin membaik juga didukung oleh adanya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang baik sepanjang periode 2000-2009 (Tabel 3.7).

**Tabel 3.7 Produktivitas Rata-Rata Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Tahun 2000 & 2009**

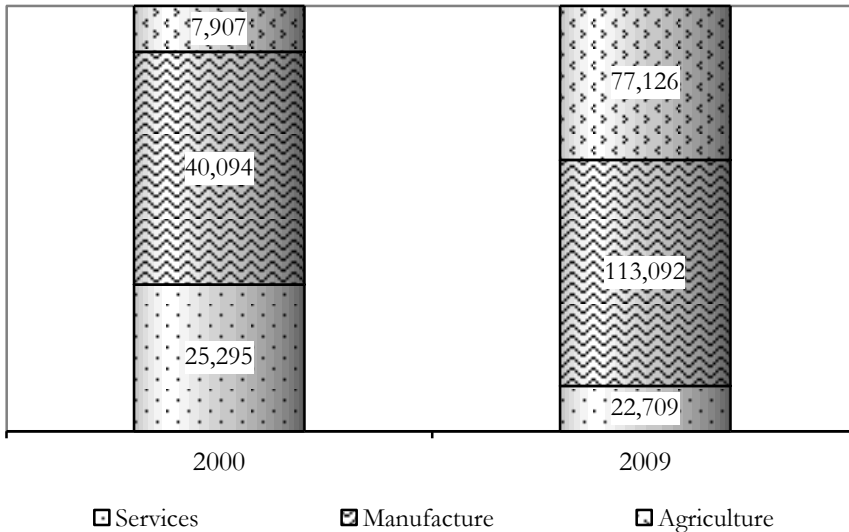
Lapangan Usaha	Produktivitas Tenaga Kerja (000 Rp)		Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
	2000	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)
SEKTOR (A)	7.907	22.709	12,44
SEKTOR (M)	40.094	113.092	12,21
SEKTOR (S)	25.295	77.126	13,19
<b>GABUNGAN</b>	<b>28.305</b>	<b>81.788</b>	<b>12,51</b>

Secara umum produktivitas tenaga kerja sektoral dapat dibedakan berdasarkan sektor dengan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja tinggi. Dari hal tersebut dapat diketahui sektor mana saja yang padat karya dan sektor padat modal. Dari gambaran Tabel 3.7 dapat diketahui peningkatan rata-rata laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja antara tahun 2000 dengan tahun 2009. Artinya perubahan produktivitas dihitung dari PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah tenaga kerja.

Dengan menggunakan klasifikasi 3 (tiga) kelompok besar sektor PDRB, yaitu *Agriculture* (sektor A atau pertanian), *Manufacturing* (sektor M, terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri

pengolahan, gas, listrik dan air, serta konstruksi), dan *Services* (sektor S, terdiri dari perdagangan, transportasi, lembaga keuangan dan jasa-jasa). Sektor padat karya seperti sektor pertanian dan bangunan cenderung bersifat massal dalam menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dengan teknologi yang sederhana. Hal tersebut menyebabkan terdapat kesulitan dalam memacu tingkat produktivitas yang tinggi. Sebaliknya sektor padat modal, yang diasumsikan sebagai sektor modern, mempunyai kecenderungan melibatkan investasi yang besar dengan menyerap jumlah tenaga kerja sedikit dan berkualitas dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan biasanya menggunakan teknologi tinggi dalam operasional kegiatannya. Beberapa sektor yang termasuk sektor modern adalah sektor Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Listrik, Gas dan Air Minum. Secara rinci, tenaga kerja di sektor-sektor tersebut memiliki tingkat produktivitas tinggi ini ditunjukkan oleh tingginya nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja.

**Grafik 3.5**  
**Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2000 dan 2009**



Berdasarkan ilustrasi Grafik 3.5, tampak kekuatan masing-masing sektornya. Selama periode 2002-2009 produktivitas tenaga kerja di Kota Samarinda meningkat rata-rata 12,51 persen per tahun. Dengan rincian sektor *Agriculture* (A) sebesar 12,44 persen, sektor *Manufacturing* (M) 12,21 persen dan sektor *Services* (S) sebesar 13,19 persen.